

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDIDIKAN, DAN
KESEHATAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2004-2014**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh:
ANDRI NURMALITA SURYANDARI
13804241013

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDIDIKAN, DAN
KESEHATAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2004-2014**

SKRIPSI

Oleh:

ANDRI NURMALITA SURYANDARI
13804241013

Telah disetujui dan disahkan pada tanggal 28 September 2017
Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Ekonomi
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui
Dosen Pembimbing



Dra. Sri Sumardiningsih, M.Si
NIP. 19530403 197903 2 001

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul:

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDIDIKAN, DAN
KESEHATAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2004-2014**

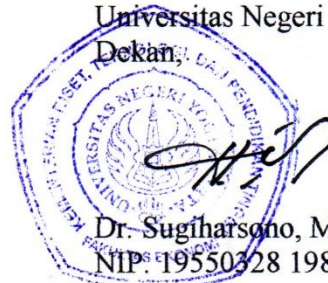
Oleh:
ANDRI NURMALITA SURYANDARI
13804241013

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 06 Oktober 2017
dan dinyatakan telah lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Supriyanto, M.M.	Ketua Penguji		16-10-2017
Dra. Sri Sumardiningih, M.Si.	Sekretaris Penguji		16-10-2017
Aula Ahmad H.S.F, SE., M.Si.	Penguji Utama		16-10-2017

Yogyakarta, 8 Oktober 2017
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,


Dr. Sugiharsono, M. Si.
NIP. 19550328 198303 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andri Nurmalita Suryandari
NIM : 13804241013
Program Studi : Pendidikan Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI,
PENDIDIKAN, DAN KESEHATAN TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2004-2014

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat orang yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Yogyakarta, 28 September 2017
Penulis,



Andri Nurmalita Suryandari
NIM. 13804241013

\

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Al-Insyirah, 6-8)

“A dream doesn't become reality through magic; it takes sweat, determination and hard work”

(Colin Powell)

“Belajarlah dari kesalahan yang terjadi maka kamu telah membuka matamu untuk kebaikan di masa depan”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil'alamin. Kupanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Dialah Maha Segalanya dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekuranganku.

Kupersembahkan sebuah karya sederhana ini sebagai bentuk rasa terimakasihku kepada kedua orangtuaku tercinta Bapak Surata dan Ibu Endaryati yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan di setiap langkahku. Terimakasih telah memberikanku kasih sayang atas semua pengorbanan dan kesabaran yang mengantarkanku sampai saat ini.

Tak lupa ku bingkiskan karya kecil ini teruntuk adikku Alfi Kurnia Nur Fadillah. Terimakasih telah menjadi penyemangat, teruslah berjuang dalam mengejar cita-cita.

*Terimakasih untuk Almamaterku tercinta,
Universitas Negeri Yogyakarta*

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDIDIKAN, DAN
KESEHATAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2004-2014**

Oleh:
Andri Nurmalita Suryandari
13804241013

ABSTRAK

Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan adalah penurunan jumlah penduduk miskin. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki peringkat pertama sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY tahun 2004-2014.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dengan *cross section* 5 kabupaten/kota di Provinsi DIY dan *time series* selama 11 tahun. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data panel dengan model *fixed effect*. Data diolah dengan menggunakan *Eviews* 8.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY; 2) Pendidikan berpengaruh tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY; 3) Kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY dan 4) Pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY tahun 2004-2014.

Kata Kunci :Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan Kemiskinan.

***THE EFFECTS OF ECONOMIC GROWTH, EDUCATION, AND HEALTH
ON THE POVERTY LEVEL IN SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
PROVINCE IN 2004-2014***

By:
Andri Nurmalita Suryandari
13804241013

ABSTRACT

One of the indicators of the success of development is a decrease in the number of poor people. Special Region of Yogyakarta Province ranks first as the region with the highest poverty rate in Java Island. This study aimed to analyze the effects of economic growth, education, and health on the poverty rate in DIY in 2004-2014.

This was a quantitative study. The data in the study were secondary data obtained from BPS statistics of DIY province collected cross-sectionally from 5 regencies/cities in DIY and with a time series for 11 years. The data analysis was the panel data analysis using the fixed effect model. The data were processed by means of Eviews 8.

The results of the study showed that: 1) economic growth had a significant negative effect on the poverty rate in DIY; 2) education did not have an effect on the poverty rate in DIY; 3) health had a significant negative effect on the poverty rate in DIY; and 4) economic growth, education, and health as an aggregate had a significant effect on the poverty rate in DIY in 2004-2014.

Keywords: *Economic Growth, Education, Health, Poverty*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada hamba-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi DIY Tahun 2004-2014”.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya tugas akhir skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan ijin penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini
3. Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan banyak hal dalam masa perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir skripsi.
4. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan selama proses studi.
5. Dra. Sri Sumardiningsih, M.Si., Dosen Pembimbing Tugas Akhir Skripsi yang senantiasa sabar memberikan bimbingan, arahan serta ilmu selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri, SE., M.Si., Dosen Narasumber yang telah memberikan masukan, saran serta ilmu dalam penyusunan skripsi ini.
7. Supriyanto, M.M., Ketua penguji yang telah memberikan saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama menimba ilmu di Jurusan Pendidikan Ekonomi UNY.
9. Bapak Datin Sudrajat, Admin Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan layanan jurusan dengan sangat baik.

10. Seluruh keluargaku yang selalu mendukung dan mendoakan selama proses studi.
11. Sahabat-sahabatku, Nurul Fitriani, Septiana Rahayu, Nita Nurwijayati, Vela Norlita, Desy Mayangsari, Fitri Rahayu yang telah setia menemani perjalanan selama masa kuliah.
12. Vita Stacia Andani, Dita Dewi Kuntiarti teman seperjuanganku dalam mengejar kesempatan untuk belajar di UNY dan Indri Setyawati yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Rekan-rekan Pendidikan Ekonomi 2013 yang telah memberikan semangat dan bantuannya selama ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dukungan yang bersifat moral maupun material dari berbagai pihak tersebut menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini memiliki kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 28 September 2017

Penulis,



Andri Nurmalita Suryandari

NIM. 13804241013

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Batasan Masalah	13
D. Rumusan Masalah.....	13
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	14
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 16
A. Kajian Teori.....	16
1. Kemiskinan	16
a. Pengertian Kemiskinan.....	16
b. Penyebab Kemiskinan	18
c. Ukuran Kemiskinan.....	22
d. Lingkaran Setan Kemiskinan.....	26
2. Pertumbuhan Ekonomi	28
a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	28
b. Ukuran Pertumbuhan Ekonomi.....	32
c. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan	33
3. Pendidikan	34
a. Pengertian Pendidikan	34
b. Hubungan Pendidikan dan Kemiskinan	36
4. Kesehatan.....	38
a. Pengertian Kesehatan	38
b. Hubungan Kesehatan dan Kemiskinan.....	40
B. Penelitian yang Relevan	41
C. Kerangka Berpikir	44

D. Paradigma Penelitian	46
E. Hipotesis Penelitian	47
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Desain Penelitian	48
B. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	48
C. Data dan Jenis Penelitian	51
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Teknik Analisis Data	52
1. Analisis Data Regresi Panel	52
2. Uji Spesifikasi Model.....	54
a. Uji Chow	54
b. Uji Hausman	55
3. Uji Asumsi Klasik	56
a. Uji Normalitas	56
b. Uji Autokorelasi.....	56
c. Uji Uji Multikolinearitas	57
d. Uji Heteroskedastisitas	57
4. Uji Signifikansi	58
a. Koefisien Determinasi	58
b. Uji Statistik t	59
c. Uji Statistik F	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Hasil Penelitian.....	60
1. Profil Daerah Istimewa Yogyakarta.....	60
a. Kemiskinan	67
b. Pertumbuhan Ekonomi	71
c. Pendidikan	73
d. Kesehatan.....	75
2. Deskripsi Data Penelitian	77
3. Analisis Data	79
a. Penentuan Model Estimasi Data Panel.....	79
1) Uji Chow.....	79
2) Uji Hausman	80
b. Uji Asumsi Klasik	81
1) Uji Normalitas.....	81
2) Uji Autokorelasi	82
3) Uji Multikolinearitas	82
4) Uji Heteroskedastisitas	83
c. Uji Signifikansi	84
1) Koefisien Determinasi	84
2) Uji Statistik F	84
3) Uji Statistik t	85

B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	87
1. Pertumbuhan Ekonomi.....	88
2. Pendidikan.....	90
3. Kesehatan	97
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Keterbatasan Penelitian.....	103
C. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	110

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kriteria Uji <i>Durbin-Watson</i>	57
2. Kepadatan Penduduk Provinsi DIY Tahun 2008-2013	62
3. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2008-2013	63
4. Estimasi Jumlah Penduduk, Sex Ratio, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2013	64
5. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur di DIY Tahun 1971-2013.	64
6. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan dan Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, Agustus 2013	66
7. Perkembangan Angkatan Kerja di DIY Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2012-2014	67
8. PRDB Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2004-2014	72
9. Statistik Deskriptif Variabel	78
10. Uji <i>Chow</i>	79
11. Uji <i>Hausman</i>	80
12. Uji Multikolinearitas	83
13. Uji Heteroskedastisitas	83
14. Uji Koefisien Determinasi	84
15. Nilai t-statistik	85
16. Struktur Penduduk Bekerja di DIY Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (persen) Tahun 2010-2014	93
17. Persentase Penduduk 15 Tahun di Provinsi DIY Menurut Pendidikan Terakhir dan Jenis Pekerjaan	96
18. Jumlah Fasilitas/Sarana Kesehatan di DIY dan Jangkauan Per Fasilitas	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Nasional Tahun 2009-2014	3
2. Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2009-2014	4
3. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2009-2014	6
4. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi DIY Tahun 2009-2014	8
5. Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi DIY Tahun 2009-2013	10
6. Angka Harapan Hidup di Provinsi DIY Tahun 2009-2014	11
7. Lingkaran Kemiskinan dari Segi Penawaran	27
8. Lingkaran Kemiskinan dari Segi Permintaan	28
9. Paradigma Penelitian	46
10. Peta Administrasi Provinsi DIY	61
11. Persentase Penduduk Lanjut Usia (65 tahun ke atas) di Provinsi DIY	65
12. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi DIY Tahun 2004-2014	69
13. Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2004-2014	70
14. Rata-rata Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2004-2014	74
15. Angka Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2004-2014	76
16. Hasil Uji Normalitas	81
17. Komposisi Penduduk DIY	100

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Penelitian	111
2. Statistik Deskriptif.....	113
3. Regresi <i>Common Effect Model</i>	113
4. Regresi <i>Fixed Effect Model</i>	114
5. Regresi <i>Random Effect Model</i>	115
6. Uji <i>Chow</i>	116
7. Uji <i>Hausman</i>	117
8. Uji Normalitas.....	118
9. Uji Multikolinearitas	118
10. Uji Heteroskedastisitas	119
11. Uji Autokorelasi	120

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan diantaranya dengan pembangunan ekonomi. Berbagai kegiatan pembangunan ekonomi dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan. Salah satunya dengan mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan pada daerah yang relatif memiliki penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan adalah penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam penurunan jumlah miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin (Simatupang, 2003).

Kemiskinan (*poverty*) masih menjadi salah satu fenomena sosial yang selalu ada di setiap negara berkembang, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki permasalahan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Nasir, dkk 2008).

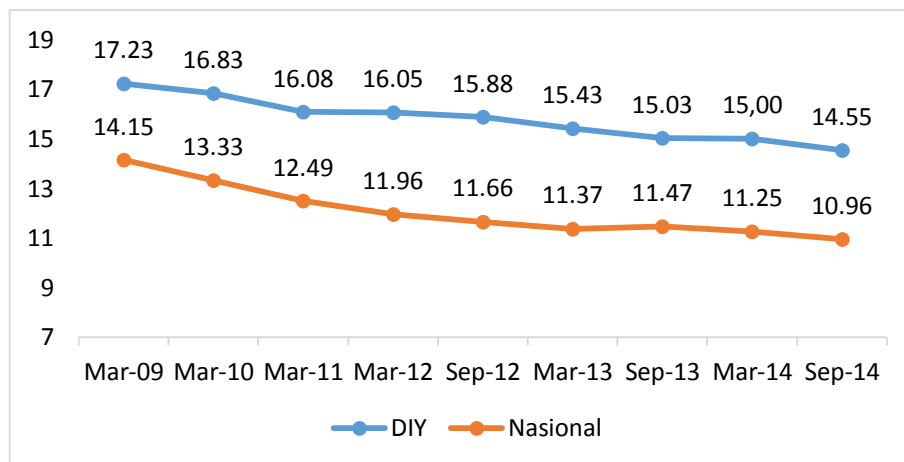
Masalah kemiskinan terus menjadi masalah besar yang dihadapi Indonesia. Tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami kecenderungan

menurun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia sejak tahun 2008-2015 mengalami penurunan dalam jumlah penduduk miskin, tetapi meskipun mengalami penurunan persentase penduduk miskin masih di atas 10%. Dimana pada tahun 2008 terdapat 15,42% penduduk miskin di Indonesia dan selama tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan hingga tahun 2014 menjadi 27,72 juta orang (10,96%) penduduk miskin di Indonesia. Pada tahun 2015 sebanyak 28,51 juta orang (11,13%) penduduk miskin di Indonesia, naik sebesar 0,17% dari tahun 2014. Kenaikan penduduk miskin tersebut diakibatkan karena kenaikan laju inflasi, harga-harga kebutuhan pokok, dan turunnya upah buruh.

Secara nasional, angka kemiskinan Indonesia 2008-2015 terus menurun. Penurunan tersebut tidak lepas dari upaya keras pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program pro rakyat dan memberikan efek positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat. Pemerintah juga harus menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok karena jika terus mengalami kenaikan akan menyebabkan inflasi dan berakibat kepada penduduk yang tergolong tidak miskin dengan penghasilan disekitar garis kemiskinan akan bergeser posisi menjadi penduduk miskin.

Permasalahan kemiskinan bukan hanya masalah nasional saja, tetapi juga merambah ke setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu daerah di Indonesia yang penduduk miskinnya masih cukup tinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Persentase penduduk miskin terhadap penduduk DIY selama periode 2009-2014 mengalami penurunan setiap tahunnya.

Tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan merupakan faktor penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Tetapi penurunan penduduk miskin dirasakan masih terlalu kecil, jauh dibawah yang diharapkan pemerintah DIY yaitu turun 2% per tahunnya.



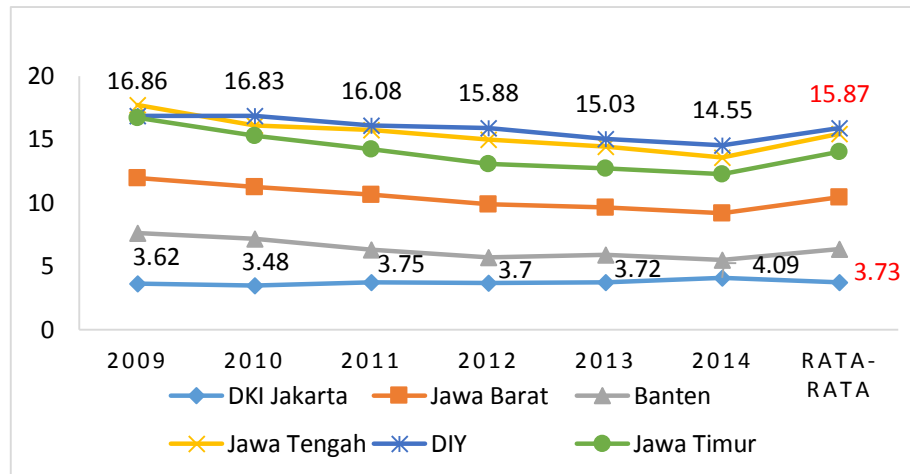
Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Nasional Tahun 2009-2014

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di DIY masih jauh berada di atas tingkat kemiskinan nasional. Tingkat kemiskinan di wilayah DIY pada periode September 2014 tercatat sebesar 14,55% sementara untuk tingkat kemiskinan nasional sebesar 10,96% pada periode September 2014. Bila dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional, angka kemiskinan di DIY masih jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DIY terus berupaya untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Masalah kemiskinan selalu menjadi prioritas pemerintah dalam menjalankan pembangunan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DIY untuk menekan angka kemiskinan melalui upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, dan peningkatan kesejahteraan

sosial ekonomi masyarakat. Keberhasilan pemerintah Provinsi DIY dalam menekan angka kemiskinan belum sepenuhnya berhasil. Ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi, yaitu angka diatas *hard core* atau diatas 10 persen.



Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2009-2014

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah.

Gambar di atas, menunjukkan persentase penduduk miskin di enam Provinsi di Pulau Jawa. Provinsi DIY menduduki peringkat pertama sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Jawa, yaitu dengan rata-rata sebesar 15,87%. DKI Jakarta yang dikenal memiliki banyak penduduk miskin persentase kemiskinannya sebesar 3,73%. Rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi di DIY menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan DIY wilayah ini bahkan jauh lebih tinggi dari DKI Jakarta, Banten dan Jawa Tengah.

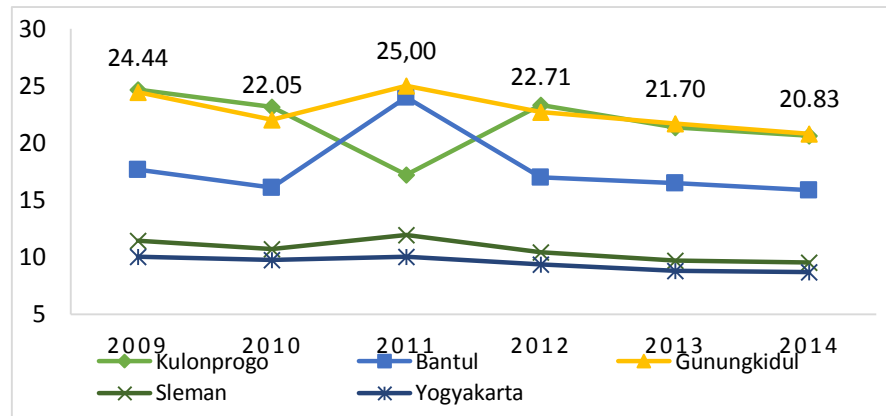
Kemiskinan adalah suatu kondisi kehidupan dimana terdapat sejumlah penduduk tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok (*basic needs*) minimum dan mereka hidup di

bawah tingkat kebutuhan minimum tersebut. Sementara itu BPS dalam mengukur kemiskinan juga berdasarkan pada kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Nilai kebutuhan dasar minimum tersebut digambarkan dengan garis kemiskinan.

Berdasarkan data BPS, garis kemiskinan di Provinsi DIY selama periode 2009-2014 mengalami peningkatan. Pada September 2013 garis kemiskinan DIY tercatat sebesar Rp 303.843 per kapita per bulan. Artinya setiap penduduk dengan nilai pengeluaran dibawah Rp 303.843 per kapita per bulan pada tahun 2013 termasuk dalam katagori penduduk miskin. Sementara September tahun 2014, tercatat garis kemiskinan meningkat menjadi Rp 321.056 per kapita per bulan. Kenaikan tersebut dimungkinkan karena terjadinya inflasi. Jika dilihat pada masing-masing kabupaten/kota, garis kemiskinan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta yaitu mencapai Rp 353.362 per kapita per bulan dan terendah di Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp 238.056 per kapita per bulan. Hal ini dikarenakan Kota Yogyakarta merupakan daerah perkotaan sehingga tingkat harga berbagai komoditas kebutuhan pokok di daerah tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

Sebagian besar penduduk miskin di Provinsi DIY bermukim di Kabupaten Gunungkidul. Jumlah penduduk miskin tahun 2013 di Kabupaten Gunungkidul sudah mencakup 21,70 % dari total penduduk di daerah tersebut. Persentase ini menunjukkan bahwa secara rata-rata dari setiap 100 orang penduduk di Kabupaten Gunungkidul, 21 orang diantaranya masih tergolong miskin. Kondisi masyarakat tersebut terkait dengan kondisi geografis yang merupakan

daerah pertanian, umumnya tanah kering, dengan produktivitas lahan yang relatif rendah karena tanahnya yang tandus dan ketersediaan air sangat terbatas akibatnya pendapatan masyarakat tidak mencukupi memenuhi kebutuhan hidup.



Gambar 3. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi DIY, Tahun 2009-2014

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah.

Perbedaan tingkat kemiskinan yang mencolok antar kabupaten/kota di Provinsi DIY berkaitan dengan distribusi hasil pertumbuhan yang tidak merata antar wilayah. Selain itu, dapat disebabkan karena standar minimum kebutuhan hidup antar satu daerah dengan daerah lain berbeda, karena sangat tergantung pada kebiasaan/adat, fasilitas transportasi, letak geografis, dan juga perbedaan tingkat kesejahteraan antar wilayah seperti perbedaan kualitas infrastruktur terutama pendidikan, kesehatan serta pasar, baik dari sisi ketersediaan maupun kemudahan dalam mengakses.

Salah satu cara mengatasi kemiskinan adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, diharapkan

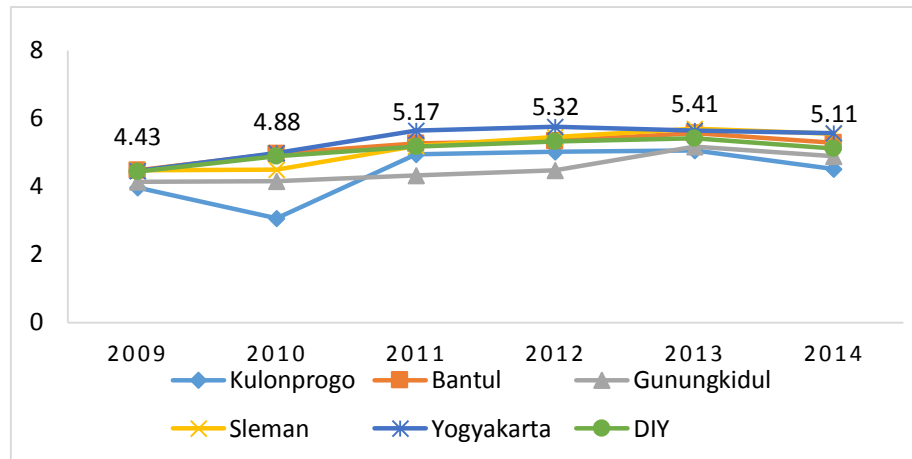
sumber-sumber pertumbuhan tersebut menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari penurunan kemiskinan di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Masih tingginya angka kemiskinan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY belum maksimal. Banyak daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi menyebabkan kesejahteraan masyarakatnya rendah sehingga memicu pertumbuhan ekonomi yang rendah pula.

Penelitian yang dilakukan Wongdesmiwati (2009), menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Hal ini berarti jika pertumbuhan ekonomi naik maka kemiskinan akan mengalami penurunan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan bagi pengurangan kemiskinan (Siregar, 2008).

Perbedaan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota sangat tergantung pada sumber daya alam dan sumber daya manusia serta teknologi yang tersedia. Gambar 4. menunjukkan bahwa pada tahun 2009-2014 pertumbuhan ekonomi DIY naik dari 4,43% menjadi 5,11%. Kenaikan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan ini belum dibarengi dengan penurunan angka kemiskinan. Capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2014 ini menurun dibanding periode sebelumnya, yakni sebesar 5,41% hal ini

disebabkan oleh pertumbuhan negatif sektor pertanian. Menurut kabupaten/kota di DIY, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013 tertinggi masih dimiliki oleh Kabupaten Sleman (5,70%) dan Kota Yogyakarta (5,63%) dan terendah Kabupaten Kulonprogo (5,05%).



Gambar 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi DIY, Tahun 2009-2014

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah.

Wilayah di Provinsi DIY hanya mencakup empat kabupaten dan satu kota. Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah hampir setengah wilayah DIY, ternyata pada tahun 2013 masih menempati urutan keempat dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,16 persen. Hal ini tidak terlepas oleh kondisi perekonomian Gunungkidul yang masih bertumpu di sektor pertanian. Memang jauh berbeda dengan Kota Yogyakarta sebagai ibu kota DIY, Kota Yogyakarta merupakan pusat pemerintahan dan ditunjang oleh sarana dan prasarana serta teknologi yang lebih memadai.

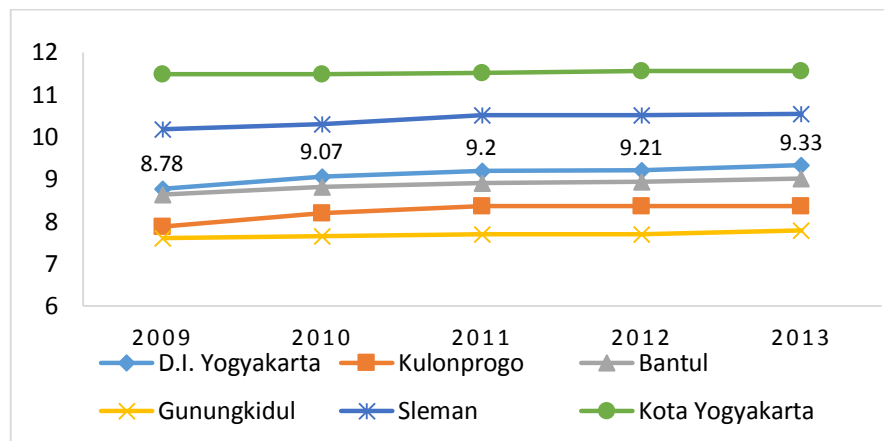
Menurut Sharp (dalam Kuncoro, 2006), terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan. Salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah rendahnya sumber daya manusia yang disebabkan karena rendahnya pendidikan.

Pendidikan merupakan kebutuhan paling asasi bagi semua orang karena masyarakat yang berpendidikan setidaknya dapat memiliki kemampuan untuk membebaskan diri dari kemiskinan.

Tingkat pendidikan dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan sebagai faktor terpenting yang dapat membuat seseorang keluar dari kemiskinan. Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan (Suryawati, 2005).

Pendidikan dalam penelitian ini dilihat dari rata-rata lama sekolah. Indikator rata-rata lama sekolah dimanfaatkan untuk melihat kualitas penduduk berdasarkan pendidikan formal yang diselesaikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas seseorang.

Berdasarkan data rata-rata lama sekolah penduduk di DIY, terjadi peningkatan yaitu dari 8,78 di tahun 2009 menjadi 9,33 di tahun 2013 atau setara dengan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Meskipun mengalami peningkatan, capaian angka rata-rata lama sekolah penduduk DIY masih rendah dan belum menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta belum mencapai target pendidikan 15 tahun yang telah diusulkan *United National Development Program* (UNDP).



Gambar 5. Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi DIY
Tahun 2009-2013

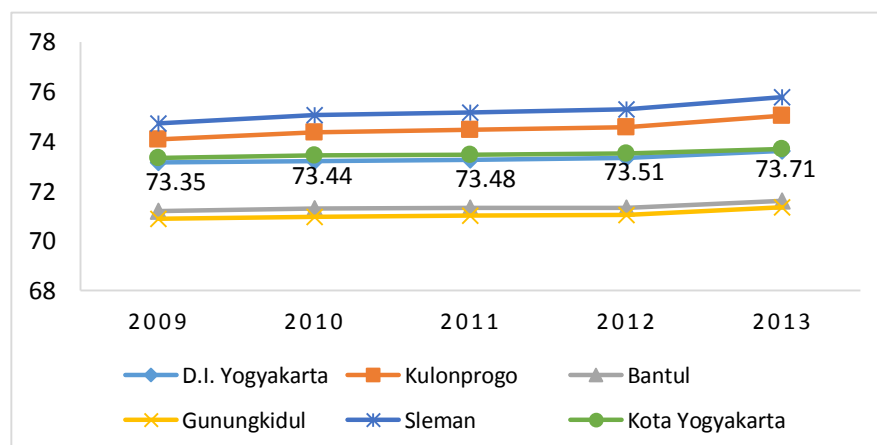
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah.

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten/Kota di DIY tertinggi adalah Kota Yogyakarta. Pada tahun 2013 rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta mencapai 11,56 tahun sedangkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Gunungkidul menduduki posisi terendah. Tahun 2013 rata-rata lama sekolah Kabupaten Gunungkidul hanya 7,9 tahun dibandingkan dengan tingkat provinsi yang sudah mencapai 9,33 tahun. Hal ini disebabkan karena minat warga Gunungkidul untuk meneruskan jenjang pendidikan yang lebih tinggi cukup rendah. Banyak warga Gunungkidul yang memilih langsung bekerja dibandingkan meneruskan pendidikan. Pemerintah Provinsi DIY terus berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah masyarakat. Salah satunya dengan menyukseskan program wajib belajar 12 tahun, namun untuk bisa mencapai rata-rata lama sekolah yang tinggi harus ada peran dari semua pihak.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan menurut Suryawati (2005) adalah kesehatan. Masalah kesehatan merupakan hal yang

rentan dihadapi oleh masyarakat miskin, hal ini diakibatkan karena keterbatasan ekonomi mereka dalam upaya mempersehat diri dan memenuhi kebutuhan masing-masing. Tingkat kesehatan akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan.

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam menyukkseskan pembangunan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Masyarakat yang memiliki tingkat kesehatan yang baik akan memiliki tingkat produktivitas kerja yang tinggi, tingkat pendapatan tinggi, tingkat pendidikan tinggi dan sejumlah hal positif lainnya. Berdasarkan dokumen RPJMD DIY tahun 2009-2013 menyebut kesehatan sebagai salah satu faktor penting dalam mengurangi kemiskinan. Indikator kesehatan salah satunya ditunjukkan dengan Angka Harapan Hidup (AHH). Semakin tinggi Angka Harapan Hidup maka semakin menunjukkan derajat kesehatan suatu daerah semakin meningkat.



Gambar 6. Angka Harapan Hidup di Provinsi DIY
Tahun 2009-2014

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah.

Perkembangan Angka Harapan Hidup di DIY dalam kurun waktu 2009-2013 menunjukkan tren peningkatan. Dari 73,35 tahun di tahun 2009 meningkat menjadi 73,71 tahun di tahun 2013. Angka harapan hidup di kabupaten/kota di DIY tertinggi adalah Kabupaten Sleman dan terendah Kabupaten Gunungkidul. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah menunjukkan pembangunan kesehatan belum berhasil, dan semakin tinggi AHH semakin menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah tersebut. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk program pemberantasan kemiskinan

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2014”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih jauh berada diatas tingkat kemiskinan Nasional.
2. Keberhasilan pemerintah Provinsi DIY dalam menekan angka kemiskinan belum sepenuhnya berhasil terlihat dari tingkat kemiskinan masih diatas 10 persen.

3. Provinsi DIY menduduki peringkat pertama sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa.
4. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum diimbangi dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan.
5. Rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi DIY masih rendah setara dengan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
6. Angka harapan hidup penduduk Provinsi DIY tinggi tetapi kemiskinan di Provinsi DIY masih tinggi.

C. Batasan Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensi, yang tidak dapat dipandang dari satu sisi saja. Penelitian ini difokuskan dengan melibatkan variabel tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi (PDRB), rata-rata lama sekolah, dan Angka Harapan Hidup. Penelitian ini hanya dilakukan di 5 kabupaten/kota Provinsi DIY dikarenakan ketersediaan data dari lembaga yang terkait. Periode tahun yang dianalisis yaitu dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 atau selama 11 tahun.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004-2014?
2. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004-2014?

3. Bagaimana pengaruh kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004-2014?
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004-2014?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas. maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004-2014.
2. Mengetahui pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004-2014.
3. Mengetahui pengaruh kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004-2014.
4. Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004-2014.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b. Sebagai bahan informasi, referensi, dan literatur tentang kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai dasar yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan menambah wawasan terhadap permasalahan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan kondisi lingkungan (Renggapratiwi, 2009).

Kemiskinan merupakan masalah yang muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti *proper*, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas. Chambers dalam Suryawati (2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Menurut Kuncoro (2003) Kemiskinan juga dapat didefinisikan sebagai “ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum”. Kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi tersebut meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

World Bank (2010) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi. Hal ini termasuk penghasilan rendah dan ketidakmampuannya untuk mendapatkan barang dasar dan layanan yang diperlukan untuk bertahan hidup dengan martabat. Kemiskinan juga meliputi rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, akses masyarakat miskin terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai, kurangnya suara dan kapasitas memadai, serta kesempatan untuk hidup yang lebih baik.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas 2004).

Kemiskinan menjadi salah satu penyakit dalam perekonomian suatu negara, terlebih lagi pada negara-negara yang masih berkembang atau negara ketiga, dimana masalah kemiskinan bersifat kompleks dan multidimensional. Kemiskinan bersifat kompleks artinya kemiskinan tidak muncul secara mendadak, namun memiliki latar belakang yang cukup panjang dan rumit sehingga sangat sulit untuk mengetahui akar dari masalah kemiskinan itu sendiri, sedangkan kemiskinan bersifat multidimensional artinya melihat dari banyaknya kebutuhan manusia yang bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki aspek primer berupa kemiskinan akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan

keterampilan, serta aset sekunder berupa kemiskinan akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Sebagai dampak dari sifat kemiskinan tersebut tergambarkan dalam bentuk kekurangan gizi, air, dan perumahan yang tidak sesuai, pelayanan kesehatan yang kurang baik, serta rendahnya tingkat pendidikan.

b. Penyebab Kemiskinan

Menurut Sharp dalam Kuncoro (2006) terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitanya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. Ketiga kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*).

Menurut Todaro (2003) kemiskinan yang terjadi di negara–negara berkembang akibat dari interaksi antara 6 karakteristik berikut :

- 1) Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat.

- 2) Pendapatan perkapita negara-negara Dunia Ketiga juga masih rendah dan pertumbuhannya amat sangat lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi.
- 3) Distribusi pendapatan sangat timpang atau sangat tidak merata.
- 4) Mayoritas penduduk di negara-negara berkembang harus hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut.
- 5) Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di negara-negara berkembang sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di negara maju.
- 6) Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai.

Kartasmita dalam Rahmawati (2006) mengemukakan bahwa, kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab, diantaranya yaitu :

- 1) Rendahnya Taraf Pendidikan

Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan seseorang untuk mencari dan memanfaatkan peluang.

2) Rendahnya Derajat Kesehatan

Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa.

3) Terbatasnya Lapangan Kerja

Selain kondisi kemiskinan dan kesehatan yang rendah, kemiskinan juga diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan.

4) Kondisi Keterisolasian

Banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

Bappenas menguraikan indikator-indikator penyebab kemiskinan seperti:

- 1) Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu.
- 2) Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan disebabkan oleh kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya

pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, kurangnya layanan kesehatan reproduksi, jarak fasilitas kesehatan yang jauh, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal.

- 3) Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan yang disebabkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas, tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung.
- 4) Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumah tangga.
- 5) Terbatasnya akses layanan kesehatan dan sanitasi. Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan nelayan, pinggiran hutan dan pertanian lahan kering kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan pemukiman yang sehat dan layak.
- 6) Terbatasnya akses terhadap air bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama disebabkan oleh terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air.
- 7) Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur

penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian.

- 8) Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam.
- 9) Lemahnya jaminan rasa aman. Hal ini terkait dengan permasalahan yang terjadi di daerah konflik.
- 10) Lemahnya partisipasi. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya informasi baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang melibatkan mereka.
- 11) Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi.

c. Ukuran Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), untuk mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Berdasarkan pendekatan tersebut, indikator yang digunakan adalah *Head Count Index* (HCI) yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan (*poverty line*).

Selain *Head Count Index* (P_0) terdapat juga indikator lain yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan, yaitu indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*- P_2) yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbecke. Rumus yang digunakan adalah

$$P_a = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^\alpha$$

Dimana:

- Z = garis kemiskinan
- i = rata-rata pengeluaran per kapita penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.
- q = banyak penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan
- N = jumlah penduduk
- α = 0,1,2
- $\alpha = 0$ = *Head Count Index* (P_0)
- $\alpha = 1$ = *Poverty Gap Index* (P_1)
- $\alpha = 2$ = *Poverty Severity Index* (P_2)

Head Count Index (P_0) merupakan jumlah persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Semakin kecil angka ini menunjukkan semakin berkurangnya jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Demikian juga sebaliknya, bila angka P_0 besar maka menunjukkan tingginya jumlah persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.

Poverty Gap Index (P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Angka ini memperlihatkan jurang (*gap*) antara pendapatan rata-rata yang diterima penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin kecil angka

ini menunjukkan secara rata-rata pendapatan penduduk miskin sudah semakin mendekati garis kemiskinan. Semakin tinggi angka ini maka semakin besar kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk.

Poverty Severity Index (P_2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Angka ini memperlihatkan sensitivitas distribusi pendapatan antar kelompok miskin. Semakin kecil angka ini menunjukkan distribusi pendapatan diantara penduduk miskin semakin merata.

Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat konsumsi seseorang dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk konsumsi orang perbulan. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Untuk mengidentifikasi kemiskinan sering digunakan adalah garis kemiskinan (*poverty line*). Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Garis kemiskinan non makanan merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan,

sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Secara umum ada dua macam ukuran kemiskinan yang biasa digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Arsyad, 2016).

1) Kemiskinan Absolut

Pada dasarnya, konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Bila pendapatan tidak mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin. Dengan demikian, Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin atau sering disebut garis batas kemiskinan. Konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolut. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup (Todaro dalam Arsyad, 2016).

2) Kemiskinan Relatif

Beberapa pakar berpendapat bahwa meskipun pendapatan seseorang sudah mencapai kebutuhan dasar minimum, namun ternyata pendapatan orang tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat disekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam kategori miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, dari lingkungan orang yang bersangkutan.

d. Lingkaran Setan Kemiskinan

Konsep lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) pertama kali di kenalkan oleh Ragnar Nurkse. Lingkaran kemiskinan didefinisikan sebagai suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain sehingga menimbulkan suatu kondisi dimana sebuah negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesulitan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi (Arsyad, 2016).

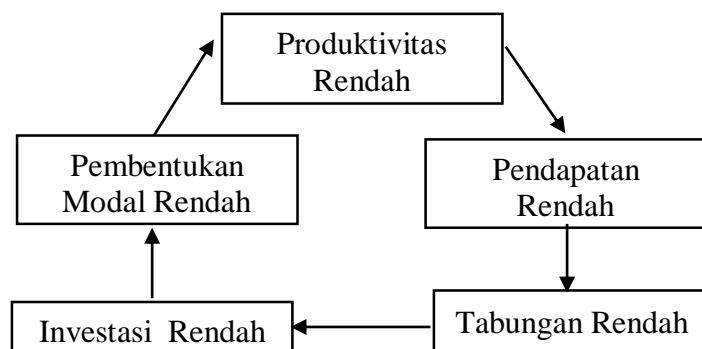
Dalam mengemukakan teorinya tentang lingkaran setan kemiskinan, pada hakikatnya Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh tidak adanya pembangunan pada masa lalu, tetapi kemiskinan juga dapat menjadi faktor penghambat dalam pembangunan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini Nurkse mengatakan : “Suatu Negara menjadi miskin karena ia merupakan Negara miskin” (*A country is poor because is poor*). Salah satu faktor sebagai penyebab

timbulnya lingkaran kemiskinan adalah adanya hambatan yang sangat kuat dalam proses pembentukan modal (Arsyad, 2016).

Pada satu sisi, pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan, dan pada satu sisi lain pembentukan modal dipengaruhi oleh ada tidaknya faktor pendorong investasi. Di negara berkembang kedua faktor tersebut tidak memungkinkan untuk terjadinya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Menurut Nurkse, terdapat dua jenis lingkaran setan yang menghalangi negara berkembang mencapai pembangunan yang pesat yaitu:

1) Dari Segi Penawaran (*Supply*)

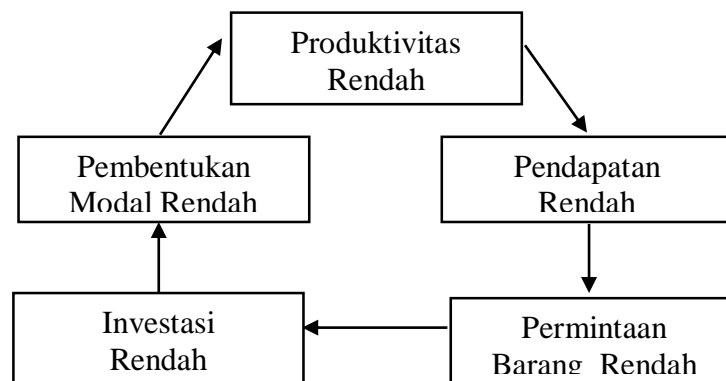
Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah yang diakibatkan oleh tingkat produktifitas yang rendah menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Akibatnya, tingkat pembentukan modal rendah. Tingkat pembentukan modal (investasi) yang rendah menyebabkan suatu negara menghadapi kekurangan barang – barang modal, dan dengan demikian tingkat produktivitas akan tetap berada pada tingkat yang rendah.



Gambar 7. Lingkaran Kemiskinan dari Segi Penawaran
Sumber : Nurkse dalam Jhingan (2000)

2) Dari Segi Permintaan (*Demand*)

Di negara-negara yang miskin perangsang untuk menanamkan modal adalah sangat rendah, karena luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas. Terbatasnya pasar disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang rendah. Pendapatan masyarakat yang rendah, karena tingkat produktifitas yang rendah disebabkan oleh pembentukan modal yang terbatas di masa lalu. Pembentukan modal yang terbatas disebabkan oleh kekurangan perangsang untuk menanam modal, sehingga kemiskinan tidak berujung pada pangkalnya.



Gambar 8. Lingkaran Kemiskinan dari Segi Permintaan
Sumber : Sumber : Nurkse dalam Jhingan (2000)

2. Pertumbuhan Ekonomi

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Arsyad (2016) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari

tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Menurut Kuznets dalam Todaro (2003) Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologi terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Menurut pandangan kaum historis, diantaranya Friedrich List dan Rostow, pertumbuhan ekonomi merupakan tahapan proses tumbuhnya perekonomian mulai dari perekonomian bersifat tradisional yang bergerak di sektor pertanian dimana produksi bersifat subsisten, hingga akhirnya menuju perekonomian modern yang didominasi oleh sektor industri manufaktur. Menurut pandangan ekonom klasik, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, maupaun ekonom Neoklasik, Robert Solow dan Trover Swan, menyatakan pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu :

- 1) Jumlah penduduk
- 2) Jumlah stok barang modal
- 3) Luas tanah dan kekayaan alam
- 4) Tingkat teknologi yang digunakan

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada

sebelumnya. Sedangkan menurut Schumpater, faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi adalah proses inovasi, dan pelakunya adalah inovator atau wiraswasta (*entrepreneur*). Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para *entrepreneur*.

Menurut Todaro dalam Arsyad (2016) ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1) Akumulasi modal

Akumulasi modal mencakup semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fisik (mesin-mesin), dan sumber daya manusia (*human resources*). Akumulasi modal akan terjadi jika ada sebagian dari pendapatan sekarang di tabung yang kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output di masa depan. Investasi juga harus disertai dengan investasi infrastruktur, yakni berupa jalan, listrik, air bersih, fasilitas sanitasi, fasilitas komunikasi, demi menunjang aktivitas ekonomi produktif. Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia bermuara pada peningkatan kualitas modal manusia, yang pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap angka produksi.

2) Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja

Pertumbuhan penduduk yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor force*) secara tradisional telah

dianggap sebagai faktor yang positif dalam pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestiknya.

3) Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi disebabkan oleh teknologi cara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional. Ada 3 klasifikasi kemajuan teknologi, yakni:

- a) Kemajuan teknologi yang bersifat netral, terjadi jika tingkat output yang dicapai lebih tinggi pada kuantitas dan kombinasi-kombinasi input yang sama.
- b) Kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenaga kerja (*labor saving*) atau hemat modal (*capital saving*), yaitu tingkat output yang lebih tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal yang sama.
- c) Kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, terjadi jika penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan barang modal yang ada secara lebih produktif.

b. Ukuran Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut.

Menurut BPS, cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto disusun dalam dua bentuk, yaitu:

- 1) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan, yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui PDRB riilnya.
- 2) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku yaitu jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud nilai tambah yaitu nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input

antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

c. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi menurut Kuznet dalam Tambunan (2014) memiliki korelasi yang kuat terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi pada tahap awal menyebabkan tingkat kemiskinan cenderung meningkat namun pada saat mendekati tahap akhir terjadi pengurangan tingkat kemiskinan secara berkesinambungan. Dengan demikian, dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan. Selanjutnya menurut penelitian Tisna (2008) menyatakan bahwa PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Menurut Siregar (2008) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (*sufficient condition*) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin (*growth with equity*). Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja (pertanian atau sektor yang padat karya). Adapun secara tidak langsung, hal itu berarti diperlukan peran pemerintah yang cukup efektif meredistribusi manfaat pertumbuhan yang boleh jadi didapatkan dari sektor modern seperti jasa dan manufaktur.

Dari hasil penelitian berarti pertumbuhan ekonomi telah menyebar di setiap golongan masyarakat miskin sehingga efektif menurunkan tingkat kemiskinan.

3. Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*), sektor pendidikan memainkan peranan sangat strategis yang dapat mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik.

Analisis atas investasi dalam bidang pendidikan menyatu dalam pendekatan modal manusia. Modal manusia (*human capital*) adalah istilah yang sering digunakan oleh para ekonom untuk pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia yang lain yang dapat meningkatkan produktivitas jika hal-hal tersebut ditingkatkan.

Keadaan pendidikan penduduk secara umum dapat diketahui dari beberapa indikator seperti angka partisipasi sekolah, tingkat pendidikan yang ditamatkan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

1) Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah merupakan indikator penting dalam pendidikan yang menunjukkan persentase penduduk usia 7-12 tahun yang masih terlibat dalam sistem persekolahan. Adakalanya penduduk usia 7-12 tahun belum sama sekali menikmati pendidikan, tetapi ada sebagian kecil dari kelompok mereka yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan setingkat sekolah dasar.

2) Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Rendahnya tingkat pendidikan dapat dirasakan sebagai penghambat dalam pembangunan. Dengan demikian, tingkat pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Keadaan seperti ini sesuai dengan hakikat pendidikan itu sendiri yakni merupakan usaha sadar

untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan didalam dan diluar sekolah yang berlangsung seumur hidup.

3) Angka Melek Huruf

Salah satu variabel yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial yang merata adalah dengan melihat tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf. Tingkat melek huruf atau sebaliknya tingkat buta huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Adapun kemampuan membaca dan menulis yang dimiliki akan dapat mendorong penduduk untuk berperan lebih aktif dalam proses pembangunan.

4) Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tinggi pendidikan yang dicapai oleh masyarakat disuatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah diikuti.

b. Hubungan Pendidikan dan Kemiskinan

Pendidikan (formal dan non formal) bisa berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efesiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan

ketrampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka. (Arsyad, 2016).

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Sitepu, 2004).

Menurut Kuznets dalam Todaro (2011) pendidikan merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Todaro menyatakan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Yang mana pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

4. Kesehatan

a. Pengertian Kesehatan

Dalam undang-undang No 36 tahun 2009, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Beberapa ekonom beranggapan bahwa kesehatan merupakan fenomena ekonomi yang dapat dinilai dari stok maupun juga dinilai sebagai investasi sehingga fenomena kesehatan menjadi variabel yang nantinya dapat dianggap sebagai suatu faktor produksi untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa, atau sebagai suatu sasaran dari berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh individu, rumah tangga maupun masyarakat, yang dikenal sebagai tujuan kesejahteraan. Oleh sebab itu, kesehatan dianggap sebagai modal yang memiliki tingkat pengembalian yang positif baik untuk individu perorangan maupun untuk masyarakat luas.

Mils dan Gilson dalam Hakimudin (2010) mendefinisikan ekonomi kesehatan sebagai penerapan teori, konsep dan teknik ilmu ekonomi pada sector kesehatan, sehingga dengan demikian ekonomi kesehatan berkaitan erat dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Alokasi sumber daya di antara berbagai upaya kesehatan.
- 2) Jumlah sumber daya yang digunakan dalam pelayanan kesehatan.
- 3) Pengorganisasian dan pembiayaan dari berbagai pelayanan kesehatan.

- 4) Efisiensi pengalokasian dan penggunaan berbagai sumber daya.
- 5) Dampak upaya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan pada individu dan masyarakat.

Kesehatan merupakan salah satu variabel kesejahteraan rakyat yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat sehubungan dengan kualitas kehidupannya. Keadaan kesehatan penduduk merupakan salah satu modal bagi keberhasilan pembangunan bangsa karena dengan penduduk yang sehat, pembangunan diharapkan dapat berjalan dengan lancar.

Variabel-variabel yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesehatan di suatu daerah umumnya terdiri dari:

- 1) Tingkat Kesakitan Penduduk

Tingkat keluhan penduduk terhadap kesehatannya, dimana semakin banyak jumlah keluhan ini maka semakin buruk kesehatan di daerah tersebut.

- 2) Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan merupakan gambaran jumlah rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta beserta kapasitas tempat tidurnya. Selain itu juga menjelaskan jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan posyandu.

- 3) Angka Harapan Hidup

Penduduk yang hidup berumur panjang umumnya memiliki tingkat kesehatan yang baik. Angka Harapan Hidup (AHH)

merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup menggambarkan umur rata-rata yang dicapai seseorang dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah menunjukkan pembangunan kesehatan belum berhasil, dan semakin tinggi AHH semakin menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah tersebut.

4) Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan menggambarkan jumlah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, bidan dan perawat.

Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

b. Hubungan Kesehatan dan Kemiskinan

Arsyad (2016) menjelaskan intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin: kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan

output energi. Oleh karena, itu kesehatan yang baik akan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Restu Ratri Astuti (2015) dengan judul “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2004 – 2012”. Analisis data diolah dengan menggunakan analisis data panel dengan model regresi *random effect*. Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari persamaan regresi dan nilai koefisien determinan (R^2). Hasil penelitian dengan taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk, pendidikan dan kesehatan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin periode 2004 – 2012. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terdapat pada subjek, waktu, dan tempat penelitian.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Adit Agus Prasetyo (2010) dalam skripsi dengan judul “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2003-2007)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data dengan pendekatan efek tetap (*fixed effect model*), dan menggunakan jenis data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa

variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Adit Agus Prasetyo yaitu sama-sama menggunakan model *fixed effect model*. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tidak menggunakan variabel upah minimum dan tingkat pengangguran.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Anggit Yoga Permana (2012) dalam skripsinya "Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2004-2009". Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat analisis panel data, yang terdiri dari *data times series* dan *data cross section*. Pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi model regresi data panel adalah dengan menggunakan *fixed effect model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel laju pertumbuhan PDRB, pendidikan, dan kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, variabel tingkat pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Permana sama-sama menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan perbedaannya terletak pada subyek, waktu dan tempat penelitian.
4. Rahmawati Faturrohmin (2011) melakukan penelitian yang menganalisis pengaruh PDRB, harapan Hidup, dan Melek Huruf terhadap tingkat Kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder dari BPS 35 kabupaten/ kota di Jawa

Tengah periode 2005 – 2009. Penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB dan Angka Harapan Hidup berpengaruh signifikan dan secara bersama-sama ketiga variabel berpengaruh terhadap kemiskinan. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan variabel PDRB dan Angka harapan hidup. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tidak menggunakan variabel melek huruf.

5. Khurri Niswati (2014) melakukan penelitian dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2011. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat analisis panel data. Pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi model regresi data panel adalah dengan menggunakan *fixed effect model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendidikan dan inflasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di 5 kabupaten/kota provinsi DIY, sedangkan variabel kesehatan dan produktivitas tenaga kerja berpengaruh secara negatif terhadap kemiskinan di DIY dan UMK berpengaruh secara positif terhadap kemiskinan di Provinsi DIY. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti di 5 kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan variabel pendidikan dan kesehatan dan sama-sama menggunakan model *Fixed Effect*. Perbedaan dalam penelitian ini adalah jangka waktu yang digunakan.

C. Kerangka Penelitian

Kemiskinan menjadi salah satu penyakit dalam perekonomian suatu negara, dimana masalah kemiskinan bersifat kompleks dan multidimensional. Sedangkan tujuan perencanaan pembangunan nasional yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan menjadi permasalahan yang mendasar dalam perekonomian. Dari kajian teoritis yang telah disampaikan sebelumnya, maka kerangka berpikir penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut:

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator yang lazim digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan kemiskinan. Dari kajian Simmon Kuznet mengenai hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan dikemukakan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan menyebabkan pengurangan tingkat kemiskinan. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Tambahan pendapatan dari aktivitas ekonomi akan berpengaruh terhadap kemiskinan jika mampu menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk golongan miskin. Semakin banyak golongan miskin memperoleh

manfaat dari pertumbuhan ekonomi maka kesejahteraannya akan meningkat dan lepas dari kemiskinan.

2. Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan

Seperti yang dikemukakan oleh Lincolin Arsyad bahwa pendidikan berperan penting dalam mengurangi kemiskinan melalui perbaikan produktivitas dan pelatihan pada golongan miskin sehingga akan meningkatkan pendapatan. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam ilmu ekonomi sering disebut dengan mutu modal manusia atau *human capital*. Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan yang akan meningkatkan produktifitas. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka pengetahuan dan keahliannya akan meningkat, sehingga akan mendorong produktivitas kerjanya. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya.

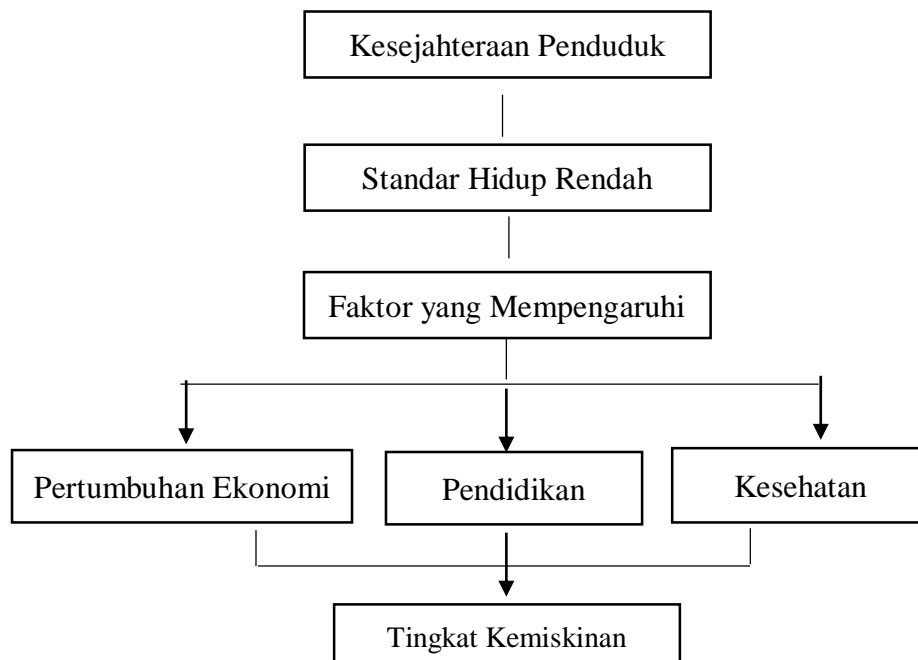
3. Pengaruh Kesehatan terhadap Kemiskinan

Lincolin Arsyad mengemukakan bahwa perbaikan tingkat kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Semakin baik tingkat kesehatan masyarakat maka akan mendorong meningkatnya produktivitas masyarakat termasuk masyarakat golongan miskin.

Kesehatan yang semakin baik akan meningkatkan produktivitas kerja mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output produksi. Sehingga tingkat kesehatan akan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan suatu daerah.

D. Paradigma Penelitian

Skema hubungan antara jumlah penduduk miskin dengan variabel-variabel yang mempengaruhi dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 9. Paradigma Penelitian

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara/kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang ada yang diajukan oleh peneliti yang sebenarnya harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka pikir penelitian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Variabel pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Variabel kesehatan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Variabel pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan secara bersama – sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif karena menggunakan data berupa angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penyajian dari hasil penelitian juga berupa angka (Arikunto, 2010). Selain itu berdasarkan pendekatannya, penelitian ini merupakan penelitian penelitian asosiatif kausal. Penelitian ini merupakan studi empiris pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY yang dilakukan berdasarkan data sekunder tahun 2004 – 2014.

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen.

1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan (Kuncoro, 2003). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan (Y). Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu untuk memenuhi standar kebutuhan hidupnya. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan dalam menggambarkan tingkat menggunakan *Head Count Index* (HCI) yaitu

jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan (*poverty line*). Persentase penduduk miskin atau *Head Count Index* (P0) ini akan digunakan sebagai variabel terikat dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini variabel kemiskinan diwakili dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta periode tahun yang digunakan mulai tahun 2004 hingga tahun 2014.

2. Variabel Independen

Variabel independen identik dengan variabel bebas, penjelas atau yang biasa dianggap penyebab atau menyebabkan variabel dependen (Kuncoro, 2003). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi (X1)

Pertumbuhan Ekonomi (X1) merupakan peningkatan output riil suatu perekonomian yang diukur dengan perubahan PDRB riil. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laju PDRB atas dasar harga konstan 2000 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2004 hingga 2014 diukur dalam juta rupiah.

b. Pendidikan (X2)

Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan diwakili dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani atau sedang dijalani. Rata-rata lama sekolah yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2004 hingga 2014 yang diukur dalam satuan tahun.

$$RLS = \frac{\sum f_i \times j_i}{\sum f_i}$$

Keterangan:

RLS : rata-rata lama sekolah

f_i : frekuensi penduduk 15 tahun ke atas pada jenjang pendidikan ke -i

j_i : lama sekolah untuk masing- masing jenjang pendidikan yang ditamatkan atau yang pernah diduduki

i : jenjang pendidikan

(BPS Yogyakarta, 2014)

c. Kesehatan (X3)

Kesehatan dalam penelitian ini diwakili oleh Angka Harapan Hidup. AHH adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup yang digunakan dalam penelitian ini adalah angka harapan hidup seluruh penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2004 hingga 2014 diukur dalam satuan tahun.

C. Data dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data (Kuncoro, 2003). Data sekunder yang digunakan berbentuk data panel. Data panel merupakan data yang dikumpulkan dalam beberapa obyek dengan beberapa waktu (Suliyanto, 2011). Data sekunder yang digunakan adalah data deret waktu (*time-series data*) untuk kurun waktu tahun 2004-2014 serta data deret unit (*cross-section*) yang meliputi 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara rinci, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004 sampai dengan 2014.
- b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga Konstan 2000 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004 sampai dengan 2014.
- c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004 sampai dengan 2014.
- d. Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004 sampai dengan 2014.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data atau mencari informasi. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi. Dokumen yang

digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini diantaranya meliputi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka berbagai tahun terbitan, Analisis Makro Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta . Semua data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY dan dinas terkait.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan data panel dan diolah menggunakan program *Eviews* 8. Data panel yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penggabungan antara periode penelitian (tahun 2004-2014) dengan data seluruh variabel yang dilihat per kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (meliputi Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta).

1. Analisis Data Regresi Panel

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Data dengan karakteristik panel adalah data yang berstruktururut waktu sekaligus *cross section* (Arifianto,2012). Adapun persamaan umum estimasi data panel adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + e_{it}, \quad i = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T$$

Dimana :

N : banyaknya observasi

T : banyaknya waktu

N x T : banyaknya data panel

Perumusan model dalam penelitian ini merujuk pada penelitian Restu Ratri Astuti dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2004–2014” dan dengan melakukan sedikit modifikasi pada model yang digunakan sehingga model yang akan diaplikasikan dalam penelitian menjadi :

$$POV_{it} = \beta_0 + \beta_1 GDRP_{it} + \beta_2 EDU_{it} + \beta_3 HEA_{it} + \mu_{it}$$

Keterangan	:
POV	: Tingkat Kemiskinan (dalam persen)
GDRP	: PDRB (dalam juta rupiah)
EDU	: Rata-rata Lama Sekolah (satuan tahun)
HEA	: Angka Harapan Hidup (satuan tahun)
β_0	: Intersep
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi
μ_{it}	: Komponen error di waktu t untuk unit <i>cross section</i> i
i	: 1-5 data <i>cross section</i> kabupaten/kota
t	: 1-11 data <i>time series</i> 2004 sampai dengan tahun 2014

Terdapat beberapa keunggulan yang diperoleh dengan menggunakan data panel menurut Gujarati (2013) dibandingkan dengan hanya menggunakan data *cross-section* murni atau *time-series* murni adalah:

- a. Teknik estimasi data panel dapat mengatasi heterogenitas dalam setiap unit secara eksplisit dengan memberikan variabel spesifik subyek.
- b. Penggabungan observasi *time series* dan *cross section* memberikan lebih banyak informasi, lebih banyak variasi, dan sedikit kolinearitas antarvariabel, lebih banyak *degree of freedom* dan lebih efisien.

- c. Dengan mempelajari observasi *cross section* berulang-ulang, data panel sangat cocok untuk mempelajari dinamika perubahan.
- d. Data panel dapat mendeteksi dan mengukur dampak yang secara sederhana tidak dapat diukur oleh data *cross-section* murni atau *time-series* murni.
- e. Data panel memudahkan untuk mempelajari model perilaku yang rumit.
- f. Data panel dapat meminimumkan bias yang dihasilkan oleh agregasi variabel *cross* dengan jumlah yang banyak.

Dalam menentukan model yang akan digunakan, terlebih dahulu perlu dilakukan uji spesifikasi model yang terdiri dari efek tetap (*fixed effects*) atau efek random (*random effect*).

2. Uji Spesifikasi Model

Sebelum melakukan regresi, langkah yang dilakukan adalah melakukan pengujian estimasi model untuk memperoleh estimasi model yang paling tepat digunakan. Untuk melakukan model mana yang akan dipakai, maka dilakukan pengujian diantaranya :

a. Uji Chow

Uji spesifikasi model bertujuan untuk menentukan model analisis data panel yang akan digunakan. Uji yang pertama dilakukan dengan menggunakan uji Chow. Uji Chow digunakan untuk menentukan model yang sebaiknya dipakai. Terdapat dua pilihan model yaitu model *fixed effect* atau model *common effect*.

H_0 : *Common Effect*

H_a : *Fixed Effect*

Apabila hasil uji Chow ini menghasilkan probabilitas *Chi-Square* lebih dari 0,05 maka model yang digunakan adalah model *common effect*. Sebaliknya, apabila probabilitas *Chi-Square* yang dihasilkan kurang dari 0,05 maka model yang sebaiknya digunakan adalah model *fixed effect*. Pada saat model yang terpilih adalah *fixed effect* maka diperlukan uji Hausman. Uji Hausman ini bertujuan untuk mengetahui apakah sebaiknya menggunakan *fixed effect model* (FEM) atau *random effect model* (REM).

b. Uji Hausman

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah pada model akan dianalisis menggunakan *model Fixed Effect Model (FEM)* atau *Random Effect Model (REM)*. Hipotesa yang digunakan adalah sebagai berikut :

H_0 : *Random Effect Model*

H_a : *Fixed Effect Model*

Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan uji hausman adalah jika H_0 diterima maka digunakan *random effect model* dan jika H_0 ditolak maka digunakan model *fixed effect model*. Apabila nilai probabilitas kurang dari taraf signifikansi 5% (0,05) maka model yang digunakan adalah *fixed effect model* dan jika nilai probabilitas lebih dari taraf signifikansi 5% maka model

yang digunakan adalah *random effect model*.

3. Uji Asumsi Klasik

Menurut Gujarati (2013) agar model regresi tidak bias atau agar model regresi BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) maka perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji persyaratan analisis untuk regresi berganda yang sering digunakan adalah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji kenormalan dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang terbaik adalah yang terdistribusi secara normal atau mendekati normal. Dalam penggunaan software Eviews normalitas dapat diketahui dengan melihat *probability J-B*. Jika *probability J-B* > 0.05 maka data berdistribusi normal sedangkan *probability J-B* < 0.05 maka data berdistribusi tidak normal.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah sebuah uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada tidaknya korelasi antar variabel. Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi atau hubungan antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (*time series*) atau ruang (*cross section*).

Cara mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi salah satunya adalah dengan uji Durbin-Watson. Keunggulan dari uji

D-W dalam mendeteksi masalah autokorelasi adalah karena uji ini didasarkan pada residual yang ditaksir.

Tabel 1. Kriteria Uji Durbin – Watson

Hipotesis Nol	Keputusan	Kriteria
Ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$dl < d < du$
Ada autokorelasi negatif	Tolak	$4-dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4-du < d < 4dl$
Tidak ada autokorelasi	Jangan tolak	$du < d < 4-du$

Sumber : Imam Ghozali (2013)

c. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Menurut Gujarati (2013), jika koefisien korelasi antarvariabel bebas lebih dari 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah multikolinearitas. Sebaliknya, koefisien korelasi kurang dari 0,8 maka model bebas dari multikolinearitas.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual dan satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Jika varian dari residual berbeda disebut heteroskedastisitas.

Penelitian ini menggunakan uji Park untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. Uji Park pada prinsipnya meregres residual yang dikuadratkan dengan variabel bebas pada model. . Jika nilai *probability* lebih kecil 0.05 maka terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya jika nilai *probability* lebih besar dari 0.05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Signifikasi

Uji signifikasi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji kesalahan atau kebenaran dari hasil hipotesis nol dari sampel. Adapun uji signifikasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi ini mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (uji *goodness of fit*). Koefisien ini nilainya antara 0 sampai dengan 1. Semakin besar nilai koefisien tersebut maka variabel-variabel independen lebih mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar sumbangan dari variabel independen terhadap variabel dependen, atau dengan kata lain koefisien determinasi mengukur variasi turunan Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X.

Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).

b. Uji Statistik t

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan (Ghozali, 2013). Dalam hal ini pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas yaitu jika nilai probabilitas < 0.05 maka variabel bebas signifikan mempengaruhi variabel terikat. Dan sebaliknya jika nilai probabilitas > 0.05 maka variabel bebas berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel terikat.

c. Uji Statistik F

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Dasar pengambilan keputusan yaitu berdasarkan nilai probabilitas: Jika probabilitas < 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi dari 33 provinsi di wilayah Indonesia dan terletak di pulau Jawa bagian tengah. Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian selatan di batasi Lautan Indonesia, sedangkan di bagian timur laut, tenggara, barat, dan barat laut di batasi oleh wilayah provinsi Jawa Tengah yang meliputi :

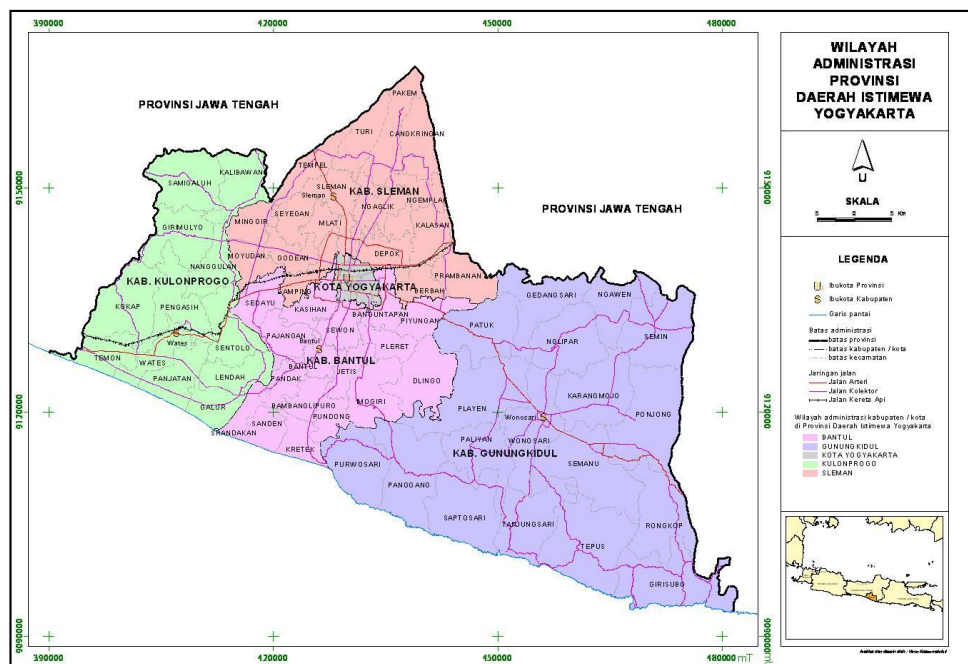
- a. Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Kabupaten Klaten
- b. Sebelah Tenggara berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri
- c. Sebalah Barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo
- d. Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Kabupaten Magelang

Secara geografis, Provinsi DIY terletak pada $7^{\circ}.33' - 8^{\circ}.12'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}.00' - 110^{\circ}.50'$ Bujur Timur, dengan luas 3.185,80 km² atau 0,17 persen dari luas Indonesia (1.890.75 km²), merupakan daerah terkecil setelah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Wilayah administratif DIY terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten, 78 kecamatan dan 438 kelurahan/desa, yaitu:

- a. Kota Yogyakarta dengan luas 32,50 km² (1.02 persen), terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan.
- b. Kabupaten Bantul dengan luas 506,85 km² (15,91 persen), terdiri dari 17 kecamatan dan 75 desa.
- c. Kabupaten Kulonprogo dengan luas 586,27 km² (18,40 persen), tersiri dari 12 kemacaran dan 88 desa.

- d. Kabupaten Gunungkidul dengan luas 1.485,36 km² (46,63 persen), tersiri dari 18 kecamatan dan 144 desa.
- e. Kabupaten Sleman dengan luas 574,82 km² (18,04 persen), terdiri dari 17 kecamatan dan 86 desa.

Kabupaten Gunungkidul yang memiliki wilayah terluas yaitu sekitar 46,6 persen dari seluruh wilayah Provinsi DIY, sebagian besar terdiri dari pegunungan kapur sehingga di beberapa wilayahnya rentan terhadap kekurangan air bersih pada musim kemarau. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang di apit oleh Samudera Indonesia oleh karena itu, Provinsi DIY memiliki hamparan pantai yang dapat menjadi wisata pantai yang potensial serta strategis untuk pengembangan usaha kelautan dan perikanan.



Gambar 10. Peta Administrasi Provinsi D.I. Yogyakarta
Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Jumlah penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 1971 jumlah penduduk di Provinsi DIY tercatat sebanyak 2.488.544 jiwa, pada tahun 1980 dan 1990 masing-masing meningkat menjadi 2.750.128 jiwa dan 2.912.611 jiwa, kemudian pada SP 2000 mencapai 3.120.478 jiwa. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk DIY tercatat sebanyak 3.457.491 jiwa. Komposisinya adalah 49,4 persen laki-laki dan 50,6 persen perempuan (BPS, 2016).

Tabel 2. Kepadatan Penduduk Provinsi DIY
Tahun 2008-2013

Kabupaten/ kota	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk Per Km ²					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kulonprogo	586,27	658	661	1.076	672	680	688
Bantul	506,85	1.748	1.774	1.798	1.819	1.844	1.869
Gunungkidul	1.485,36	455	455	455	461	466	471
Sleman	574,82	1.835	1.870	1.902	1.942	1.964	1.986
Yogyakarta	32,50	12.024	11.990	11.958	12.077	12.234	12.391
Provinsi DIY	3.185,80	1.065	1.076	1.085	1.102	1.115	1.128

Sumber : Badan Pusat Statistik.

Tabel di atas ini menunjukkan tingkat kepadatan penduduk di kabupaten/kota di DIY pada tahun 2008-2013. Luas wilayah mempengaruhi tingkat kepadatan penduduk. Pada tahun 2012, Kabupaten Gunungkidul yang mempunyai wilayah terluas dengan jumlah penduduk 684.740 orang (19,48%) tercatat sebagai kabupaten berkepadatan penduduk terendah, yaitu 466 jiwa/km². Rendahnya kepadatan penduduk di Gunungkidul berkaitan dengan karakteristik wilayah yang relatif luas dan memiliki topografi berupa pegunungan yang kurang menarik untuk dijadikan sebagai tempat tinggal maupun tempat untuk melakukan aktivitas ekonomi. Bahkan,

terdapat kecenderungan kaum terdidik dari daerah ini justru melakukan migrasi keluar dengan tujuan mencari penghidupan yang lebih baik (BPS,2016). Berbeda dengan Kota Yogyakarta yang memiliki wilayah terkecil dengan jumlah penduduk 394.012 jiwa (11,12%) tercatat sebagai wilayah DIY yang berkepadatan penduduk tertinggi, yaitu 12.123 jiwa/km² pada tahun 2012. Selain Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Bantul menjadi daerah yang memiliki peningkatan kepadatan penduduk yang tinggi.

Kondisi tahun 2013 menunjukkan jumlah penduduk DIY sebanyak 3594854 orang yang sebagian besar terpusat di Kabupaten Sleman, yaitu sebanyak 1.141.684 orang. Sementara itu Kabupaten Kulonprogo memiliki jumlah penduduk terendah, yaitu sebanyak 402.709 orang.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2008-2013

Tahun	Kabupaten/Kota					
	K.Progo	Bantul	G.Kidul	Sleman	Yogya	DIY
2008	385 937	886 061	675 471	1 054 751	390 783	3 393 003
2009	387 493	899 312	675 474	1 074 673	389 685	3 426 637
2010	388 869	911 503	675 382	1 093 110	338 627	3 457 491
2011	390207	921263	677998	1107304	390553	3487325
2012	393221	927958	684740	1114833	394012	3514762
2013	403203	947066	700192	1141684	402709	3594854
Jumlah	1186631	2796287	2062930	3363821	1187274	

Sumber : Badan Pusat Statistik

Sementara itu jika dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan DIY pada tahun 2010 sebesar 50,57% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki sekitar 49,43%. Hal tersebut terlihat dari besarnya *sex ratio* DIY sebesar 97,76% yang berarti bahwa terdapat sekitar 97 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.

Wilayah DIY yang memiliki *sex ratio* tertinggi adalah Kabupaten Sleman, yaitu 100,53% dan terendah adalah Gunungkidul, yaitu 93,69%. Untuk Kabupaten Sleman jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan (BPS, 2016).

Tabel 4. Estimasi Jumlah Penduduk, Sex Ratio, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2013

Kabupaten/Kota	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)	Sex Ratio (%)
Kulonprogo	197.600	205.603	403.203	96,11
Bantul	469.981	477.085	947.066	98,51
Gunungkidul	337.696	362.496	700.192	93,16
Sleman	574.891	566.793	1.141.684	101,43
Yogyakarta	195.704	207.005	402.709	94,54
Provinsi DIY	1.775.872	1.818.892	3.594.854	97,63

Sumber : Badan Pusat Statistik

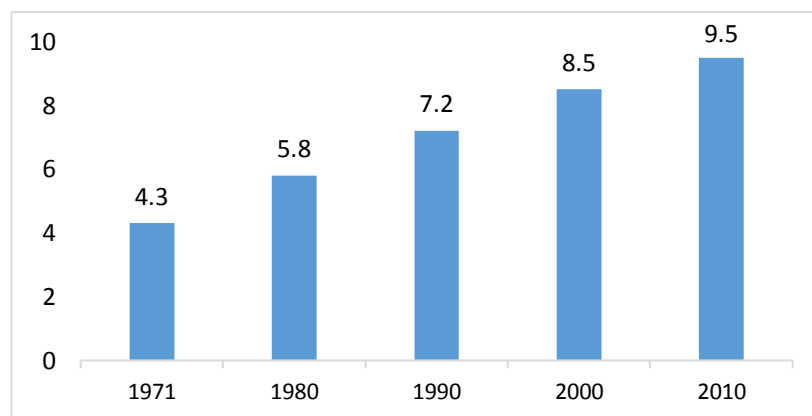
Komposisi kelompok umur penduduk DIY selama kurun waktu 1971-2010 didominasi oleh penduduk usia dewasa/produktif. Penduduk kelompok umur 0-14 tahun selama kurun waktu tersebut cenderung mengalami penurunan. Sejak tahun 1990, struktur umur penduduk DIY dikatakan sebagai “penduduk usia tua” karena penduduk umur 0-14 tahun kurang dari 30% dan penduduk usia 65 tahun ke atas mengalami kenaikan. Semakin meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut mengindikasikan tingginya usia harapan hidup penduduk DIY.

Tabel 5. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur di DIY Tahun 1971-2013

Umur	1971	1980	1990	2000	2010	2011	2012	2013
0 – 14	40,90	35,06	28,28	22,38	21,96	21,88	21,80	21,75
15 – 64	54,82	59,14	64,46	69,10	68,53	68,13	68,45	68,66
65+	4,38	5,80	7,26	8,53	9,51	10,00	10,55	11,01
Jumlah	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik

Persentase penduduk kelompok umur 0-14 tahun cenderung terus menurun. Struktur umur penduduk di Provinsi DIY sejak tahun 1990 dapat dikatakan sebagai “penduduk usia tua” karena persentase penduduk usia 0-14 tahun kurang dari 30 persen. Sebaliknya hingga tahun 2010 persentase penduduk usia 65 tahun ke atas cenderung semakin meningkat. Pada tahun 1971 persentase penduduk usia 65 tahun ke atas sebesar 4,3 persen dan pada tahun 2000 meningkat mencapai 9,5 persen. Hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya pergeseran struktur penduduk yang ditandai dengan tumbuhnya struktur penduduk tua. Pergeseran struktur penduduk menunjukkan adanya transisi demografi yang diantaranya dipengaruhi oleh perbaikan kesehatan masyarakat. Pergeseran juga merupakan indikasi tingginya angka harapan hidup penduduk.



Gambar 11. Persentase Penduduk Lanjut Usia (65 tahun ke atas)
Provinsi DIY, SP 1971-2010

Sumber : Badan Pusat Statistik.

Penurunan persentase penduduk usia 0-14 tahun dan meningkatnya persentase penduduk usia 65 tahun ke atas, berkaitan erat dengan keberhasilan usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan keberhasilan program Keluarga Berencana. Keberhasilan

peningkatan kesejahteraan rakyat dapat menekan tingkat kematian dan meningkatkan angka harapan hidup. Disisi lain, kesadaran masyarakat untuk mengikuti program KB bisa menurunkan tingkat fertilitas.

Tabel 6. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan dan Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, Agustus 2013

Kegiatan	Kabupaten/Kota					
	K.Progo	Bantul	G.Kidul	Sleman	Yogya	DIY
Angkatan kerja	75,61	66,78	77,87	65,67	64,38	69,29
1. Bekerja	73,46	64,54	76,56	63,51	60,23	67,05
2. Pengangguran	2,15	2,24	1,32	2,16	4,16	2,25
Bukan Angkatan Kerja	24,39	33,22	22,13	34,33	35,62	30,71
1. Sekolah	4,18	4,57	1,94	11,47	12,92	7,17
2. Mengurus R.tangga	15,31	19,63	14,60	16,83	17,46	17,03
3. Lainnya	4,90	9,02	5,58	6,03	5,24	6,50
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	311.148	732.616	549.212	894.971	325.141	2.813.088
TPT	2,85	3,36	1,69	3,28	6,45	3,24

Sumber : Badan Pusat Statistik.

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Agustus 2013 tercatat sebanyak 2.813.088 jiwa penduduk usia kerja. Jumlah tersebut terdiri dari 1.949.243 jiwa (69,29 persen) merupakan penduduk yang termasuk angkatan kerja, sedangkan 863.845 jiwa (30,71 persen) termasuk penduduk bukan angkatan kerja. Dari jumlah angkatan tersebut sebanyak 96,76 persen adalah bekerja. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, kondisi ketenagakerjaan cukup bervariasi. Terdapat perbedaan jumlah penduduk yang bekerja dan menganggur yang cukup nyata. Hal tersebut disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan jumlah penduduk yang mencari pekerjaan atau yang telah memasuki usia kerja dan mengakibatkan munculnya tingkat pengangguran.

Sumber daya manusia yang berkualitas dapat meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi di suatu daerah. Salah satu ukuran kualitas sumber daya dapat dilihat dari tingkat pendidikan angkatan kerja. Angkatan kerja yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas. Perkembangan angkatan kerja di DIY berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7. Perkembangan Angkatan Kerja di DIY Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2012-2014

Uraian	2012	2013	2014
<SD	668.553	643.959	650.195
SLTP	35.563	339.721	370.007
SLTA	661.685	651.291	683.232
DI/DII/DIII/Akademi	6.971	77.796	86.478
Universitas	18.928	198.192	233.549

Sumber : Badan Pusat Statistik.

Dari tabel di atas disimpulkan bahwa struktur angkatan kerja di DIY didominasi oleh lulusan SLTA dan tidak tamat SD. Pada tahun 2014 jumlah angkatan kerja lulusan SLTA sebesar 683.232 jiwa dan tidak lulus SD sebesar 650.195 jiwa. Sedangkan angkatan kerja lulusan DI/DII/DIII dan universitas baru mencapai sekitar 15,82% di tahun 2014 (RKPD DIY, 2016).

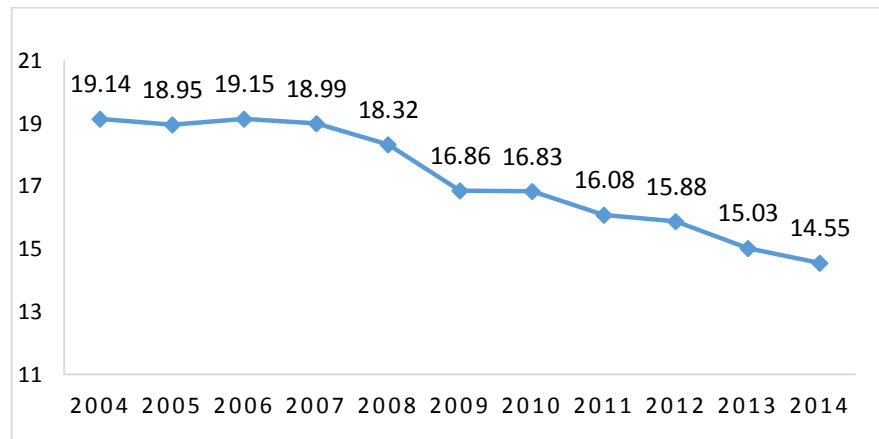
Berikut adalah kondisi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

a. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan

pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemiskinan adalah suatu kondisi kehidupan dimana terdapat sejumlah penduduk tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok (*basic needs*) minimum dan mereka hidup di bawah tingkat kebutuhan minimum tersebut.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dari persentase penduduk miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk wilayah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, yaitu diatas angka *hard core* atau diatas 10 persen bahkan Provinsi DIY menduduki peringkat pertama sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa dimana persentase penduduk miskin sebesar 14,55% di tahun 2014. Tingginya angka kemiskinan di Provinsi DIY karena dipicu oleh beberapa aspek kehidupan masyarakat seperti ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, ketiadaan usaha produktif meliputi keterampilan dan daerah yang kurang produktif serta ketiadaan modal.

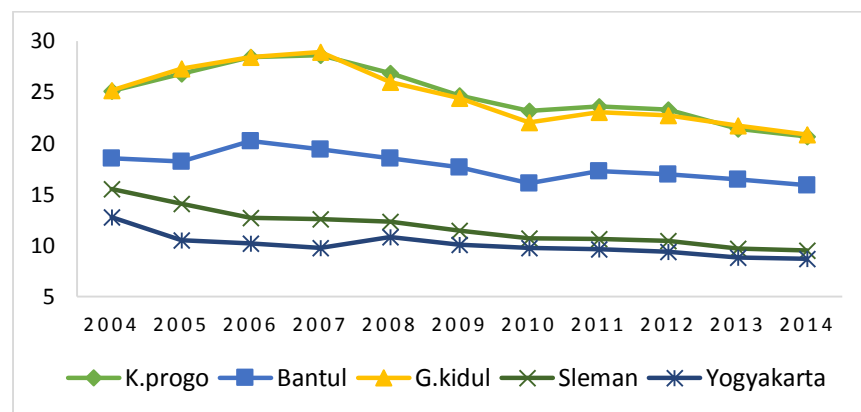


Gambar 12. Persentase Penduduk Miskin Provinsi DIY
Tahun 2004-2014

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar di atas, menunjukkan persentase penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2004-2014. Dalam gambar tersebut, secara umum tingkat kemiskinan di Provinsi DIY mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2006, persentase penduduk miskin mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2005. Peningkatan jumlah dan persentase penduduk periode 2005 sampai dengan 2006 hal ini terjadi akibat pengaruh kenaikan harga (inflasi) yang cukup tinggi terutama harga kelompok komoditas pangan dan kelompok energi (bahan bakar, minyak, listrik dan gas). Kenaikan harga ini mendorong kenaikan harga barang dan jasa sehingga penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin. Oleh sebab itu, garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2006 menjadi meningkat.

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan mengalami kenaikan pada tahun 2006 namun secara keseluruhan dapat terlihat bahwa tingkat kemiskinan cenderung mengalami penurunan sampai dengan tahun 2014. Penurunan angka kemiskinan ini tidak terlepas dari usaha pemerintah Provinsi DIY.



Gambar 13. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY (dalam persen), Tahun 2004-2014

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Gunungkidul sebesar 20,83% pada tahun 2014. Luas wilayah dan sangat beragamnya kondisi geografis menyebabkan permasalahan kemiskinan di kabupaten Gunungkidul menjadi spesifik. Sampai saat ini kabupaten Gunungkidul masih menghadapi masalah kemiskinan yang antara lain ditandai oleh jumlah penduduk dan keluarga yang masuk dalam kategori miskin masih cukup tinggi. Selain itu kabupaten Gunungkidul dikenal sebagai daerah yang tandus dan berkapur sehingga menyebabkan produktivitas lahan menjadi rendah dan ketersediaan air sangat terbatas akibatnya pendapatan masyarakat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan

hidup. Hal inilah menyebabkan masih tingginya kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul.

Kota Yogyakarta sebagai ibu kota Provinsi DIY memiliki tingkat kemiskinan terendah di bandingkan kabupaten lainnya. Persentase penduduk miskin di Kota Yogyakarta tahun 2004 sebesar 12,77% mengalami penurunan menjadi 8,67% di tahun 2014. Kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintah dan ditunjang oleh sarana dan prasarana serta teknologi yang lebih memadai hal ini menyebabkan wilayah Kota Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan yang rendah. Pada tabel di atas juga dapat dilihat jumlah penduduk miskin di 3 kabupaten lainnya yaitu Bantul, Sleman dan Kulonprogo juga mengalami penurunan sampai dengan tahun 2014.

Perbedaan tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota tersebut merepresentasikan kesejahteraan penduduk antar wilayah yang cukup heterogen. Perbedaan kualitas infrastruktur pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan infrastruktur fisik lainnya maupun kemudahan dalam mengakses sarana menjadi penjelas perbedaan kualitas kesejahteraan yang cukup mencolok. Secara umum, perkembangan kemiskinan di semua kabupaten/kota selama lima tahun terakhir menunjukkan pola yang menurun (BPS,2016).

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk domestik regional bruto atau pendapatan daerah, jadi

perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berikut disajikan data PDRB ADHK 2000 menurut kabupaten/kota tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 di Provinsi DIY.

Tabel 8. PDRB Atas Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY (juta Rupiah)
Tahun 2004-2014

Tahun	K.Progo	Bantul	G.kidul	Sleman	Yogya
2004	1398744	3080312	2613238	4839376	4195392
2005	1465477	3234173	2726389	5080563	4399902
2006	1524848	3299646	2830583	5309059	4574051
2007	1587630	3448948	2941288	5553580	4776401
2008	1662370	3618060	3070298	5838246	5021149
2009	1728304	3779948	3197365	6099557	5244851
2010	1781227	3967928	3330080	6373200	5505942
2011	5246147	12728666	9248011	22645852	18206090
2012	5475148	13407022	9695980	23957113	19187075
2013	5741660	14138719	10177433	25367414	20239557
2014	6002787	14867409	10639466	26740537	21312143

Sumber : Badan Pusat Statistik

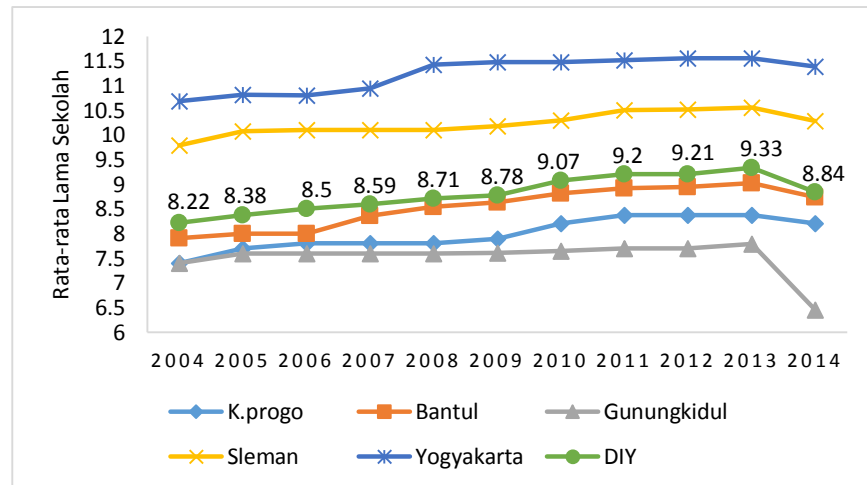
Kinerja perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2004 sampai 2014 yang diukur dari PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 secara bertahap mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2004 nilai PDRB sebesar 16.146.424 juta Rupiah mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2014 sebesar 79.532.277 juta Rupiah hal ini membuktikan bahwa semakin produktifnya ekonomi di DIY. Banyak faktor yang mempengaruhi kenaikan PDRB seperti investasi, jumlah industri, dan tenaga kerja.

Provinsi DIY terdiri dari empat kabupaten dan satu kota dimana tentunya setiap kabupaten dan kota masing-masing mempunyai potensi ekonomi yang berbeda sesuai keadaan daerahnya masing-masing sehingga akan mempunyai nilai PDRB yang berbeda-beda antar wilayah. Dari tabel diatas nilai PDRB semua kabupaten/kota di Provinsi DIY mengalami peningkatan, dari 5 kabupaten/kota nilai PDRB terbesar berada di Kabupaten Sleman sebesar 4.839.37 juta Rupiah di tahun 2004 meningkat menjadi 26.740.537 juta Rupiah pada tahun 2014, kemudian di susul oleh Kota Yogyakarta dengan nilai PDRB sebesar 4.195.392 juta Rupiah di tahun 2004 mengalami peningkatan di tahun 2014 menjadi 21.312.143 juta Rupiah hal ini cukup beralasan karena Kota Yogyakarta merupakan ibu kota provinsi dengan tingkat aktivitas perekonomian yang tinggi. Sedangkan nilai PDRB terendah adalah di kabupaten Kulonprogo sebesar 6.002.787 juta Rupiah di tahun 2014. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY yang tidak merata untuk setiap daerah disebabkan karena masing-masing daerah mempunyai keunggulan dan kelemahan yang menjadi ciri khas daerah tersebut.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan modal manusia (*human capital*) dalam pembangunan ekonomi yang tidak lain merupakan investasi dalam jangka panjang. Dengan pendidikan akan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang akan mendorong peningkatan

produktivitas kerja seseorang, sehingga lebih memudahkan dalam mencari pekerjaan dan terhindar dari kemiskinan. Pendidikan dalam penelitian ini dilihat dari rata-rata lama sekolah penduduk di kabupaten/kota di Provinsi DIY.



Gambar 14. Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi DIY
Tahun 2004-2014

Sumber : Badan Pusat Statistik

Perkembangan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2004 rata-rata lama sekolah tercatat sebesar 8,22 tahun atau setara dengan kelas 8 jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Angka tersebut selalu mengalami peningkatan hingga tahun 2013 mencapai 9,33 tahun atau setara dengan lulus SMP. Dengan demikian, rata-rata penduduk usia produktif di Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun. Jika dibandingkan pada tahun 2010, rata-rata lama sekolah hanya sebesar 9,07 tahun. Kenaikan rata-rata lama sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan modal

penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia di Provinsi DIY yang lebih baik. Pada tahun 2014 rata-rata lama sekolah Provinsi DIY mengalami penurunan yaitu 8,84 tahun hal ini disebabkan karena perubahan perhitungan rata-rata lama sekolah dengan metode baru.

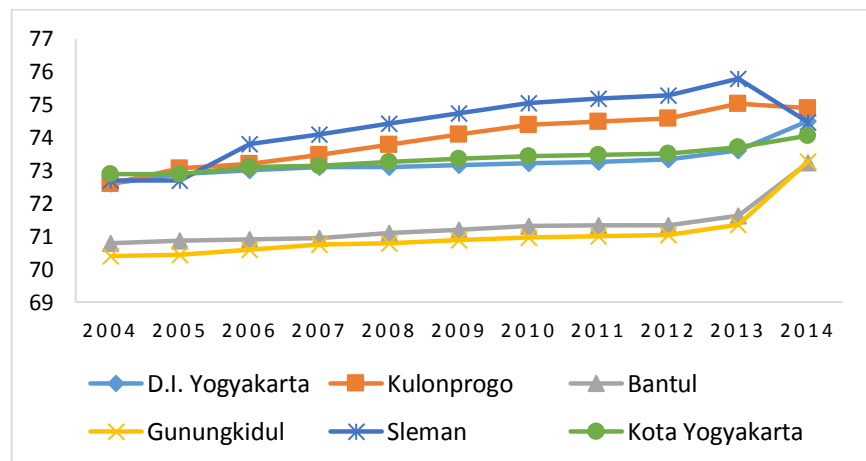
Pencapaian angka rata-rata lama sekolah di Provinsi DIY jika dikaitkan dengan target yang telah ditetapkan oleh *United National Development Program* masih tertinggal jauh. Angka rata-rata lama sekolah di DIY pada tahun 2013 baru mencapai 9,33 tahun atau setara dengan lulus SLTP, padahal angka yang ditargetkan oleh UNDP yakni minimal 15 tahun.

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul berada di bawah angka rata-rata lama sekolah DIY. Ketiga kabupaten tersebut tidak mencapai wajib belajar sembilan tahun. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta jauh di atas rata-rata, bahkan hampir mencapai 12 tahun (tamat pendidikan menengah).

d. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam menyukseskan pembangunan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Indikator kesehatan salah satunya ditunjukkan dengan Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh seseorang dari lahir selama hidupnya. Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat

kesehatan masyarakat karena dapat mencerminkan lama hidup dan kualitas hidup sehat seseorang. AHH yang rendah di suatu daerah menunjukkan pembangunan kesehatan belum berhasil, dan semakin tinggi angka harapan hidup semakin menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah tersebut. Panjangnya usia yang ditempuh seseorang tidak terlepas dari dukungan faktor kesehatan yang baik. Grafik dibawah menggambarkan perkembangan angka harapan hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dari 2004-2014.



Gambar 15. Angka Harapan Hidup di Provinsi DIY
Tahun 2004-2014

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka harapan hidup Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Angka harapan hidup secara rata-rata di Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat menjadi 73,62 tahun pada tahun 2013 dari sebelumnya yang mencapai 73,22 tahun di tahun 2010. Hal ini diduga karena adanya kesadaran masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta akan pentingnya kesehatan yang tercermin pada meningkatnya angka

harapan hidup. Secara umum, tingginya pencapaian angka harapan hidup provinsi DIY salah satunya dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat disamping perbaikan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat yang mendorong penurunan angka kematian bayi dan balita. Perbaikan kondisi kesehatan masyarakat juga didukung oleh beberapa faktor lain diantaranya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, angka kesakitan, dan ketersediaan sarana kesehatan Kabupaten Sleman memiliki angka harapan hidup tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya yaitu sebesar 75,79 tahun pada tahun 2013. Sedangkan angka harapan hidup terendah terdapat di Kabupaten Gunungkidul sebesar 71,36 tahun. Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan di suatu wilayah akan disertai oleh peningkatan usia harapan hidup penduduknya, namun sebaliknya semakin rendah usia harapan hidup di suatu wilayah mencerminkan buruknya kualitas pembangunan kesehatan.

2. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data diperoleh baik dari publikasi cetak maupun publikasi *online*. Penelitian ini menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, rata-rata lama sekolah, dan angka harapan hidup terhadap tingkat kemiskinan. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan *Eviews 8*.

Berikut ini merupakan tabel mengenai deskripsi data dari tiap variabel yang digunakan dalam penelitian. Data yang disajikan merupakan nilai log dari setiap variabel. Nilai log digunakan untuk menyerdehanakan atau menyertakan nilai tiap variabel yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 9. Statistik Deskriptif di Provinsi DIY

Variabel	N	Mean	Minimum	Maximum	Std. Dev
Kemiskinan	55	2.806364	2.160000	3.360000	0.392038
PDRB	55	15.52127	14.15000	17.10000	0.812971
RLS	55	9.104273	6.450000	11.56000	1.458546
AHH	55	72.81836	70.40000	75.79000	1.563329

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel statistik deskriptif di atas, selama kurun waktu 2004 sampai dengan 2014 rata-rata tingkat kemiskinan yaitu sebesar 2.80 atau sebesar 17,79 persen. Tingkat kemiskinan tertinggi dicapai oleh Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2007 sebesar 3.36 atau sebesar 28,9 persen. Sedangkan, tingkat kemiskinan terendah dicapai oleh Kota Yogyakarta pada tahun 2014 yaitu 2.16 atau sebesar 8,67 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu 17.10 atau sebesar Rp. 25.367.414 juta dicapai oleh Kabupaten Sleman pada tahun 2014. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi terendah dicapai oleh Kabupaten Kulonprogo 14.15 atau sebesar Rp. 1.398.744 ditahun 2004. Indikator tingkat pendidikan dilihat dari rata-rata lama sekolah, pencapaian tingkat rata-rata sekolah terendah sebesar 6,45 tahun dicapai oleh Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2014 dan rata-rata lama sekolah tertinggi dicapai oleh Kota Yogyakarta pada tahun 2012-2013 sebesar 11,56 tahun. Indikator untuk mengukur tingkat kesehatan dapat dilihat dari Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup tertinggi sebesar

75,79 tahun, dicapai oleh Kabupaten Sleman pada tahun 2013. Sedangkan Angka Harapan Hidup terendah dicapai oleh Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2004 sebesar 70,40 tahun.

3. Analisis Data

a. Penentuan Model Estimasi Data Panel

Dalam menentukan model estimasi yang dapat digunakan untuk penelitian ini dilakukan beberapa pengujian yaitu uji Chow dan uji Hausman.

1) Uji Chow

Uji Chow bertujuan untuk menentukan model yang sebaiknya digunakan Terdapat dua pilihan model yaitu model *fixed effect* atau model *common effect*. Hipotesis dalam uji Chow yaitu sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect*

H_a : *Fixed Effect*

Apabila hasil uji Chow ini menghasilkan probabilitas *Chi-Square* lebih dari 0,05 maka model yang digunakan adalah model *common effect*. Sebaliknya, apabila probabilitas *Chi Square* yang dihasilkan kurang dari 0,05 maka model yang sebaiknya digunakan adalah model *fixed effect*.

Tabel 10. Uji Chow

<i>Effect Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	22.872310	(4,47)	0.0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	59.435477	4	0.0000

Sumber: Output pengolahan data menggunakan E-Views 8

Berdasarkan pengolahan data di atas, tabel hasil uji Chow menunjukkan bahwa *probability cross-section Chi-square* sebesar 0.0000 artinya kurang dari taraf signifikansi 0.05. Maka dapat diputuskan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga model yang terpilih adalah *fixed effect model*. Pada saat model yang terpilih adalah *fixed effect* maka diperlukan uji Hausman. Uji Hausman ini bertujuan untuk mengetahui apakah sebaiknya menggunakan *fixed effect model* (FEM) atau *random effect model* (REM)

2) Uji Hausman

Uji Hausman bertujuan untuk mengetahui apakah *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM) yang dipilih. Hipotesa yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$H_0 : \text{Random Effect Model}$$

$$H_a : \text{Fixed Effect Model}$$

Jika probabilitas *Chi Square* yang diperoleh kurang dari 0.05 maka H_0 ditolak, sehingga model yang lebih sesuai untuk digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Sebaliknya, apabila H_a ditolak, maka model yang sebaiknya digunakan adalah *Random Effect Model* (REM). Dari hasil regresi diperoleh berdasarkan *Metode Fixed Effect* model diperoleh nilai sebagai berikut:

Tabel 11. Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi. Sq. Statistic</i>	<i>Chi. Sq d.f</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	49.298190	3	0.0000

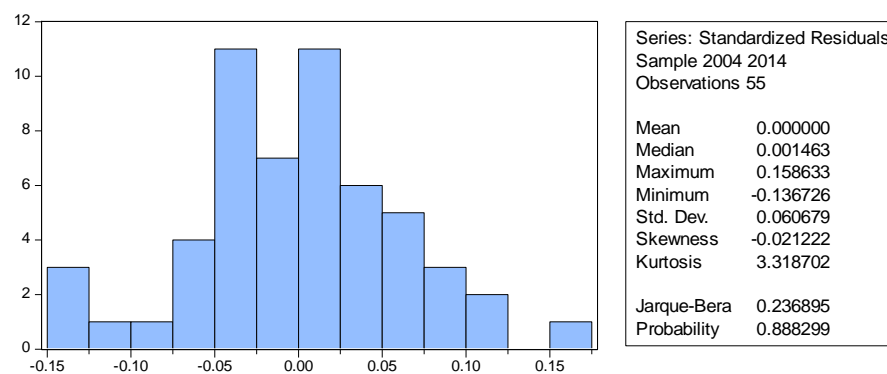
Sumber: Output pengolahan data menggunakan E-Views 8

Berdasarkan hasil uji Hausman yang dilakukan, diketahui bahwa nilai probabilitas *Cross-section random* adalah sebesar 0.0000 lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan model terbaik yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*.

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas kedua-duanya berdistribusi normal atau tidak. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan melihat *Jarque-Bera test* atau J-B test yaitu apabila probabilitas > 0.05 maka dapat diputuskan bahwa data yang dimiliki berdistribusi normal.



Gambar 16. Hasil Uji Normalitas

Sumber: Output pengolahan data menggunakan E-Views 8

Berdasarkan uji normalitas di atas menunjukkan bahwa nilai *probability* J-B adalah sebesar 0.888299. Angka tersebut lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

2) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode atau waktu dengan kesalahan pengganggu pada ruang atau waktu sebelumnya. Cara mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi salah satunya dengan uji *Durbin-Watson*.

Berdasarkan hasil uji Autokorelasi, diperoleh nilai *Durbin-Watson* sebesar 1.783211. Untuk melihat ada tidaknya masalah autokorelasi diketahui dengan cara membandingkan nilai *Durbin-Watson* dengan tabel *Durbin-Watson*. Dalam penelitian ini $n=55$ serta $k=3$, $dL=1.4523$ dan $dU=1.6815$. Nilai tersebut pada kriteria $dU < d < 4-dU$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah autokorelasi.

3) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Menurut Gujarati (2013), jika koefisien korelasi antarvariabel bebas lebih dari 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah Multikolinearitas. Sebaliknya, koefisien korelasi kurang dari 0,8 maka model bebas dari multikolinearitas. Berikut ini adalah hasil uji multikolinearitas :

Tabel 12. Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	Keterangan
X1	1	0.542951	0.334902	Tidak terjadi Multikolinearitas
X2	0.542951	1	0.505041	Tidak terjadi Multikolinearitas
X3	0.334902	0.505041	1	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber: Output pengolahan data menggunakan E-Views 8

Berdasarkan hasil uji di atas menunjukkan bahwa nilai korelasi antar variabel independen lebih kecil dari 0.8 sehingga disimpulkan bahwa model terbebas dari masalah multikolinearitas.

4) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedasitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varian residual satu dari pengamatan ke pengamatan lain. Uji heteroskesdasitas ini menggunakan metode uji Park. Jika nilai *probability* lebih kecil 0.05 maka terjadi heterokesdasitas dan sebaliknya jika nilai *probability* lebih besar dari 0.05 maka tidak terjadi heterokesdasitas.

Tabel 13. Uji Heterokesdasitas

Variable	Prob.	Keterangan
X1	0.7972	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
X2	0.1952	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
X3	0.4937	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Output pengolahan data menggunakan E-Views 8

Berdasarkan uji heteroskesdasitas di atas menunjukkan bahwa *probability* semua variabel lebih dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokesdasitas dalam model tersebut.

c. Uji Signifikansi

1) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi atau *Goodness of fit* digunakan untuk mengukur seberapa jauh tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien Determinasi (R^2) memiliki kelemahan mendasar yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan koefisien determinasi yang disesuaikan (adjusted R^2).

Tabel 14. Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.976044
Adjusted R-squared	0.972476

Sumber: Output pengolahan data

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai *adjusted R-squared* sebesar 0.972476. Hal ini berarti bahwa, 97,24 persen tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, Rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup. Sedangkan sisanya 2,76 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model atau faktor-faktor lain diluar penelitian ini.

2) Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Dari hasil regresi pengaruh PDRB, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup

terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY tahun 2004-2014 diperoleh nilai F-hitung sebesar 273.5566 dengan nilai probabilitas F sebesar $0.000000 < 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen (PDRB, Rata-rata lama sekolah, dan angka harapan hidup) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (tingkat kemiskinan).

3) Uji Statistik t

Uji t atau uji parsial dilakukan untuk menguji apakah variabel independen (PDRB, Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Hidup) berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (tingkat kemiskinan).

Tabel 15. Nilai t-Statistik

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>t-statistic</i>	<i>Prob.</i>	<i>Sign.</i>
X1	-0.061616	-2.882033	0.0059	Signifikan
X2	-0.033427	-1.025346	0.3104	Tidak Signifikan
X3	-0.071334	-4.210803	0.0001	Signifikan

Sumber: Output pengolahan data menggunakan E-Views 8

Berdasarkan hasil Uji t menunjukkan bahwa secara individu, terdapat dua variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel dependen. Variabel tersebut adalah PDRB dan Angka Harapan Hidup. Sedangkan variabel Rata-rata Lama Sekolah tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.

a) Pengaruh PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa variabel PDRB memiliki t-hitung sebesar -2.882033 dengan

probabilitas sebesar $0.0059 < 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

b) Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa variabel Rata-rata Lama Sekolah memiliki t-hitung sebesar -1.025346 dengan probabilitas sebesar $0.3104 > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Rata-rata Lama Sekolah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan

c) Pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa variabel Angka Harapan Hidup memiliki t-hitung sebesar -4.210803 dengan probabilitas sebesar $0.0001 < 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Angka Harapan Hidup berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis data panel dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB, Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Hidup terhadap Tingkat Kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004-2014. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan model *Fixed Effect* diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$POV_{it}=9.26-0.06GDRP_{it}-0.03EDU_{it}-0.07HEA_{it}+ \mu_{it}$$

Keterangan	:
POV	: Tingkat Kemiskinan (dalam persen)
GDRP	: Pertumbuhan Ekonomi (dalam juta rupiah)
EDU	: Rata-rata Lama Sekolah (satuan tahun)
HEA	: Angka Harapan Hidup (satuan tahun)
β_0	: Intersep
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi
μ_{it}	: Komponen error di waktu t untuk unit <i>cross section</i> i
I	: 1-5 data <i>cross section</i> kabupaten/kota
T	: 1-11 data <i>time series</i> 2004 sampai dengan tahun 2014

Berdasarkan persamaan regresi di atas, dapat dilihat bahwa koefisien konstanta sebesar 9.26 menunjukkan bahwa jika variabel PDRB, Rata-rata lama sekolah dan Angka Harapan Hidup dianggap konstan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 9.26. Nilai koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi sebesar -0.06 berarti bahwa setiap peningkatan PDRB sebesar 1 persen, maka dapat menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0.06 persen dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*). Pada variabel Rata-rata lama sekolah diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0.03 berarti bahwa setiap peningkatan variabel Rata-rata lama sekolah sebesar 1 persen maka dapat menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0.03 persen. Nilai

koefisien variabel Angka Harapan Hidup sebesar -0.07, hal ini berarti bahwa setiap peningkatan harapan hidup sebesar 1 persen, maka dapat menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0.07persen.

Interpretasi dari hasil regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah, pendidikan, dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004-2014 adalah sebagai berikut :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan dengan menggunakan model *Fixed Effect*, menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB) secara individu berpengaruh negatif dan signifikan dengan nilai *probability* 0.0059 terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Adit Agus Prasetyo (2010) yang memperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi signifikan secara statistik terhadap kemiskinan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dijadikan sebagai salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian disuatu wilayah. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumberdaya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa teori yang dikemukakan Kuznet sesuai. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa pertumbuhan dan kemiskinan memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi pada tahap awal menyebabkan tingkat kemiskinan cenderung meningkat namun pada saat mendekati tahap akhir pembangunan terjadi pengurangan tingkat kemiskinan secara berkesinambungan. Dengan demikian, dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan, artinya jika PDRB meningkat maka kemiskinan akan menurun dan sebaliknya jika PDRB menurun maka kemiskinan meningkat (Kuznet dalam Tambunan, 2014).

Pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya.

Menurut Siregar (2008), pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembanguan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya adalah pertumbuhan ekonomi tersebut harus efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan hendaknya menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti

pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja yaitu sektor pertanian atau sektor yang padat karya. Adapun secara tidak langsung, hal itu berarti diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari sektor modern seperti jasa padat modal. Dari hasil penelitian berarti pertumbuhan ekonomi telah menyebar di setiap golongan masyarakat miskin sehingga efektif menurunkan tingkat kemiskinan.

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Wongdesmiwati (2009), menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan sesuai dengan hipotesis yang diajukan, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

b. Pendidikan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY. Hal ini terlihat dari nilai *probability* sebesar 0.3104 yang lebih besar dari 0,05 dengan koefisien sebesar -0.244731. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Arsyad (2016) mengatakan bahwa pendidikan (baik formal maupun non formal) dapat berperan

penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung, yaitu melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung, yaitu melalui pelatihan golongan miskin dengan bekal ketrampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan pendapatan mereka. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas seseorang. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang dapat diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya.

Pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Ditemukan tidak adanya pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan menandakan bahwa meningkatnya rata-rata lama sekolah kurang berdampak bagi tingkat produktivitas. Alasan bahwa variabel rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan salah satunya adalah capaian angka rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi DIY masih belum menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada tahun 2004-2014 rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi DIY tertinggi mencapai 9.33 tahun atau setara dengan lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2013. Angka tersebut masih belum mencapai target pendidikan maksimal 15 tahun atau setara

Sekolah Menengah Atas (SMA) yang telah diusulkan *United National Development Program* (UNDP). Rata-rata lama sekolah pada masing-masing kabupaten/kota Provinsi DIY pada periode 2004-2014 juga tidak mengalami peningkatan yang berarti sehingga memungkinkan terjadi ketidaksignifikanan dalam peranannya terhadap kemiskinan. Rata-rata lama sekolah penduduk DIY mengalami peningkatan yang relatif lambat. Dalam kurun waktu 11 tahun, kenaikan rata-rata lama sekolah penduduk DIY hanya sebesar 0,62 tahun (tahun 2004 mencapai 8,22 tahun dan tahun 2014 mencapai 8,84 tahun).

Taraf pendidikan yang tercermin dari rata-rata lama sekolah yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri yang terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja sehingga kemiskinan yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tetap tinggi. Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan memiliki akses yang terbatas terhadap tingkat pendidikan, sehingga menyebabkan kualitas sumber daya manusianya rendah yang akan berdampak pada tingkat produktivitasnya, sehingga penghasilan penduduk miskin menjadi rendah.

Menurut Kuznet dalam Todaro (2011), pendidikan di banyak negara merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Dimana digambarkan dengan seorang miskin yang mengharapkan pekerjaan baik serta penghasilan yang tinggi maka harus mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Tetapi pendidikan tinggi hanya mampu dicapai

oleh orang kaya. Sedangkan orang miskin tidak mempunyai cukup uang untuk membiayai pendidikan hingga ke tingkat yang lebih tinggi seperti sekolah lanjutan dan universitas. Sehingga tingkat pendidikan sangat berpengaruh dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khurri Niswati (2014) bahwa pendidikan yang diukur dari rata-rata lama sekolah memiliki nilai *probability* sebesar 0.3702. Nilai *probability* tersebut lebih dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di 5 kabupaten/kota Provinsi DIY tahun 2003-2011. Hal ini terjadi dikarenakan sektor yang mendominasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor pertanian yang keduanya tidak terlalu membutuhkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi.

Tabel 16. Struktur Penduduk Bekerja di DIY menurut Lapangan Pekerjaan Utama (Persen), tahun 2010-2014

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014
Pertanian	30,40	26,17	27,82	28,18	25,41
Industri Pengolahan	13,92	14,68	14,97	13,36	13,97
Konstruksi	6,19	7,30	6,92	5,54	7,48
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	24,69	25,76	24,52	25,87	25,86
Transportasi dan Komunikasi	3,80	3,70	3,27	3,48	3,52
Keuangan, Real Estat, Jasa Perusahaan	2,18	2,74	3,06	2,87	3,75
Jasa-Jasa	17,93	18,73	18,58	19,93	19,14
Lainnya (Penggalian, LGA)	0,89	0,92	0,85	0,77	0,86
Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik

Sektor lapangan usaha yang menjadi tumpuan penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mencari nafkah adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor pertanian. Data Badan Pusat Statistik tahun 2014 sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan sektor Pertanian menunjukkan angka yang signifikan dibanding dengan sektor lain yaitu 25,86 persen dan 25,41 persen.

Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan penduduk di Provinsi DIY minim akan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagian besar penduduk Provinsi DIY berpendidikan rendah dengan ketrampilan dan keahlian yang kurang memadai, sehingga belum mempunyai ketrampilan dan keahlian yang baik. Akibatnya, sebagian besar penduduk Provinsi DIY memilih bekerja di sektor-sektor yang tidak membutuhkan pendidikan tinggi dan keahlian khusus.

Pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan hal tersebut dapat disebabkan karena adanya *mismatch* antara pendidikan dan tingkat pekerjaan yang terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Mismatch* merupakan tidak sesuainya antara pekerjaan yang diperoleh dengan pendidikan yang telah ditempuh sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan. Menurut pendapat Ragnar Nurkse, rendahnya pendapatan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya tabungan dan investasi ini menyebabkan keterbelakangan dan seterusnya sehingga mengakibatkan kemiskinan.

Kesesuaian jenis pekerjaan terhadap latar belakang pendidikan dilihat dari tingkat pendidikan penduduk. Penduduk yang berpendidikan tinggi memiliki kesempatan lebih besar dari penduduk yang hanya lulusan SLTA ke bawah untuk memperoleh pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi. Jenis pekerjaan tenaga profesional membutuhkan seseorang dengan tingkat pendidikan tinggi agar dapat menjalankan pekerjaan dengan baik. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa lulusan pendidikan tinggi masuk dalam jenis pekerjaan sebagai tenaga produksi atau tenaga pertanian/perkebunan.

Apabila dilihat dari tabel 17, terlihat pada kolom jenis pekerjaan terdapat beberapa persen yang tidak sesuai (*mismatch*) antara jenis pekerjaan dengan pendidikan yang ditempuh. Kondisi tersebut terlihat dari jenis pekerjaan tenaga profesional oleh penduduk dengan tingkat pendidikan rendah atau dibawah lulusan SMA/SMK. Selain itu, terdapat lulusan pendidikan tinggi (D1 sampai dengan S1) yang terserap pada jenis pekerjaan nomor 6 dan 7.

Tabel 17. Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas di Provinsi DIY
Menurut Pendidikan Terakhir dan Jenis Pekerjaan, 2010

Pendidikan Terakhir	Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan *) (%)							Total
	1	2	3	4	5	6	7	
Tidak Sekolah	0,00	0,00	0,00	8,94	2,79	74,30	13,97	100,00
Tidak Tamat SD	0,11	0,00	0,00	18,16	4,93	52,35	24,44	100,00
SD/IBTIDAIYAH	0,40	0,00	0,64	16,91	5,45	48,00	28,61	100,00
SMP/TSANAWIYAH	0,46	0,09	4,63	23,17	7,51	30,12	34,01	100,00
SMP KEJURUAN	0,99	0,00	1,98	36,63	8,91	23,76	27,72	100,00
SMA/ALIYAH	6,52	1,28	10,49	33,25	7,16	11,89	29,41	100,00
SMK	4,62	0,62	9,11	24,22	5,87	17,98	37,58	100,00
PROGRAM D I/II	53,03	0,00	16,67	13,64	7,58	6,06	3,03	100,00
PROGRAM D III	29,22	3,90	25,32	22,73	4,55	2,60	11,69	100,00
PROGRAM D.IV/S1	59,22	6,42	12,29	11,17	4,47	2,51	3,91	100,00
PROGRAM S2/S3	83,33	5,56	5,56	5,56	0,00	0,00	0,00	100,00

Sumber: Sakerans

Keterangan: *) 1. Tenaga Profesional, Teknisi dan Tenaga Lain. 2. Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan. 3. Pejabat Pelaksana, Tenaga Tata Usaha dan Tenaga Lain. 4. Tenaga Usaha Penjualan. 5. Tenaga Usaha Jasa. 6. Tenaga Usaha Tani, Kebun, Ternak, Perikanan, Hutan dan Perburuan. 7. Tenaga Produksi, Operator alat, angkutan dan Pekerja Kasar

Berdasarkan tabel di atas, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih terdapat *mismatch* sebanyak 3,03 persen dengan latar belakang pendidikan D1/D2, kemudian untuk lulusan D3 sebanyak 11,69 persen dan sebanyak 3,91 persen tenaga kerja lulusan S1 yang semuanya bekerja pada jenis pekerjaan nomor 7 dimana lebih sesuai apabila diisi oleh pekerja dengan tingkat pendidikan rendah. Terserapnya tenaga kerja pendidikan rendah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih banyak terserap pada jenis pekerjaan nomor 4,5,6 dan 7. Jenis pekerjaan nomor 6 terbanyak menyerap tenaga kerja tingkat pendidikan rendah tetapi lulusan pendidikan tinggi (D1 sampai S1) juga yang terserap pada jenis pekerjaan nomor 6. Tenaga kerja yang tidak sekolah sebanyak 74,3 persen masuk dalam jenis pekerjaan nomor 6. Kemudian tenaga kerja yang tidak tamat SD dan hanya tamatan SD masing-masing

sebanyak 52,35 persen dan 48 persen yang terserap. Pola penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta umumnya terjadi pada provinsi yang sektor pertaniannya masih berjalan. Sektor pertanian di Provinsi DIY mampu menyerap tenaga kerja khususnya tenaga kerja yang berpendidikan rendah. Sehingga mayoritas penduduk di Provinsi DIY bekerja di sektor pertanian yang tidak membutuhkan keahlian khusus.

c. Kesehatan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tingkat kesehatan yang diukur dengan Angka Harapan Hidup berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY. Hal ini terlihat dari nilai *probability* sebesar $0.0001 < 0.05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati Faturrohim (2011) yang memperoleh hasil bahwa Angka Harapan Hidup memiliki hubungan yang negatif dan signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Semakin tinggi Angka Harapan Hidup suatu daerah, maka derajat kesehatan daerah tersebut meningkat. Dengan penduduk yang sehat maka produktivitas akan meningkat pula. Meningkatnya produktivitas penduduk akan meningkatkan pendapatan sehingga kesejahteraan di wilayah tersebut juga meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Lincoln Arsyad. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu

alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin, kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan meningkatkan output energi. Oleh karena itu, kesehatan yang baik akan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Kesehatan berpengaruh terhadap kemiskinan karena kesehatan merupakan syarat untuk meningkatkan produktivitas seseorang. Seseorang yang kondisi kesehatannya buruk, tidak akan melakukan pekerjaan dengan efektif. Jika seseorang tidak efektif dalam bekerja, maka produktifitasnya rendah. Jika produktivitas rendah, berarti penghasilannya juga rendah. Penghasilan seseorang yang rendah akan membuat orang tersebut kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga orang tersebut bisa terjebak dalam kemiskinan.

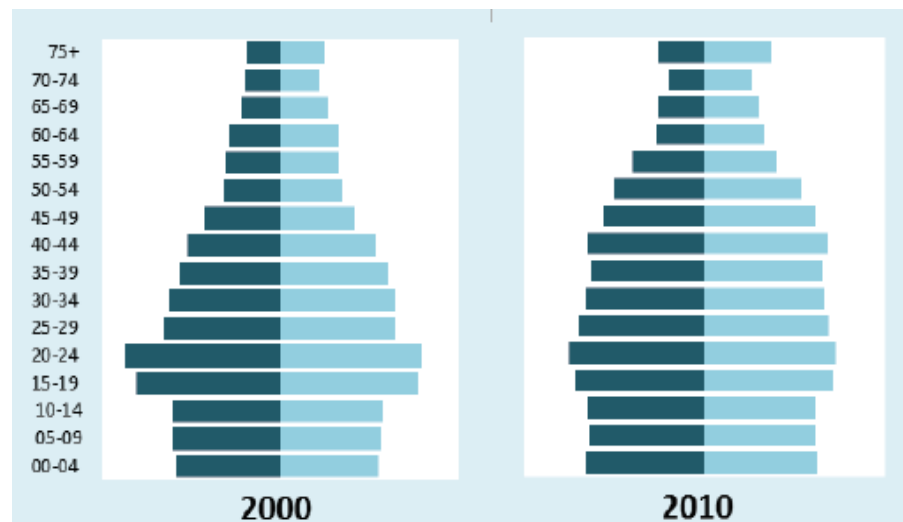
Berdasarkan hasil analisis regresi, tingkat kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kesehatan masyarakat miskin semakin membaik, maka tingkat kemiskinan akan menurun. Hal ini sejalan dengan pernyataan diatas bahwa dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia maka produktivitas masyarakat miskin akan naik, sehingga akan mempengaruhi tingkat pendapatan dan akan menentukan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggit Yoga Permana (2012) yang memperoleh hasil bahwa Angka Harapan hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Tingkat kesehatan yang baik disuatu negara, setiap individu akan memiliki rata-rata hidup yang lebih lama, dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa Angka Harapan Hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan tren Angka Harapan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2004 sampai tahun 2014 terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Selain itu, angka harapan hidup Provinsi DIY juga tergolong tinggi. Pada tahun 2013 tercatat angka harapan hidup penduduk DIY mencapai 73,62 tahun sedangkan angka harapan hidup nasional pada tahun 2013 sebesar 70,07 tahun. Hal tersebut menunjukkan adanya selisih 3,55 tahun pencapaian angka harapan hidup antara penduduk DIY dengan Nasional.

Berdasarkan hasil sensus penduduk SP 2010 terlihat adanya pergeseran komposisi penduduk. Komposisi penduduk hasil SP 2010 menunjukkan pergeseran ke atas. Pergeseran ini salah satunya disebabkan karena meningkatnya rata-rata angka harapan hidup penduduk. Angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan yang baik pada penduduk DIY.

Secara umum terjadi peningkatan populasi penduduk berusia tua (>64 tahun) dan hal ini menandakan adanya perbaikan kualitas kesehatan yang mendorong meningkatnya usia harapan hidup penduduk.



Gambar 17. Komposisi Penduduk DIY
Sumber : Badan Pusat Statistik

Secara umum, tingginya angka harapan hidup penduduk DIY salah satunya dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat disamping perbaikan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat yang mendorong penurunan angka kematian bayi dan balita. Perbaikan kondisi kesehatan masyarakat juga didukung oleh beberapa faktor lain diantaranya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta ketersediaan sarana prasarana kesehatan yang memadai sangat mendukung kesehatan di Provinsi DIY.

**Tabel 18. Jumlah Fasilitas/Sarana Kesehatan di DIY
dan Jangkauan per Fasilitas**

Fasilitas Kesehatan	Jumlah Sarana/Fasilitas			Rasio per 100.00 Penduduk		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Rumah Sakit	63	66	72	1,81	1,88	2,00
Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit	5.588	5.888	6.393	160,24	167,52	177,84
Rumah Bersalin	71	70	70	2,04	1,99	1,95
Balai Pengobatan	181	181	181	5,19	5,15	5,03
Puskemas/Pukestu /Puskesmas	578	576	579	16,57	16,39	16,11
Apotek	428	464	526	12,27	13,20	14,63

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 jumlah fasilitas atau sarana kesehatan di Provinsi DIY menunjukkan ketersediaan fasilitas yang semakin tercukupi. Hal ini dapat dibuktikan dari semakin meningkatnya ketersediaan fasilitas. Pada tahun 2013 jumlah puskesmas yang tersebar di 5 kabupaten/kota di Provinsi DIY mengalami peningkatan sebanyak 579. Jika dilihat dari kemudahan dalam mengakses puskesmas dapat dilihat dari nilai rasio puskesmas/puskesmas/puskesmas per 100.000 penduduk. Pada tahun 2013, nilai rasionya mencapai 16,11 yang berarti setiap satu unit sarana yang tersedia memiliki beban untuk melayani penduduk sebanyak 6.209 jiwa penduduk.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini terlihat dari nilai *probability* 0.0059 dengan koefisien -0.061616 yang berarti bahwa setiap peningkatan PDRB sebesar 1 persen, maka dapat menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0.06 persen. Dari hasil penelitian berarti pertumbuhan ekonomi telah menyebar di setiap golongan masyarakat miskin sehingga efektif menurunkan tingkat kemiskinan.
2. Pendidikan diukur dengan Rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini terlihat dari nilai *probability* sebesar 0,3104 > 0,05 dengan koefisien sebesar -0.0033427. Hal ini dikarenakan sektor yang mendominasi di Provinsi DIY yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertanian yang keduanya tidak terlalu membutuhkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi. Selain itu, adanya *mismatch* antara pendidikan dan tingkat pekerjaan yang terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Kesehatan diukur dengan Angka Harapan Hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini terlihat dari nilai *probability* sebesar $0.0001 < 0.05$ dengan koefisien -0.071334 . Hal ini dikarenakan Angka harapan hidup penduduk DIY tergolong tinggi. Kesadaran penduduk DIY akan pentingnya kesehatan sangat tinggi dan ketersediaan sarana prasarana kesehatan yang memadai sangat mendukung kesehatan di Provinsi DIY.
4. Pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004-2014. Hal ini terlihat dari nilai prob. F-statistic $0.000000 < 0.05$.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan data dengan periode yang relatif pendek yaitu antara tahun 2004-2014.
2. Penggunaan *cross-section* yang terlalu sedikit karena jumlah kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya berjumlah 5.
3. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan, namun dalam penelitian ini hanya menganalisis 3 variabel saja.

C. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penelitian, peneliti mengajukan saran yaitu untuk berbagai pihak yaitu:

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, sehingga untuk dapat lebih efektif menekan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi harus mampu menjangkau hingga ke lapisan masyarakat miskin. Dengan demikian, pemerintah daerah hendaknya dapat melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada distribusi pendapatan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menjangkau ke seluruh golongan masyarakat, termasuk penduduk yang berpenghasilan rendah serta dilakukan upaya peningkatan PDRB di masing-masing wilayah dengan mengandalkan potensi yang dimiliki.
2. Dalam penelitian ini menunjukkan pendidikan belum mampu secara efektif menurunkan angka kemiskinan hal ini dikarenakan banyak penduduk yang memiliki rata-rata lama sekolah hanya sekitar lulusan Sekolah Menengah Pertama. Karena itu, diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama golongan miskin. Pemerintah perlu mengoptimalkan program bantuan kepada siswa miskin sehingga dapat membantu mereka dalam menyelesaikan pendidikan. Pemerintah juga perlu

meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pendidikan formal maupun nonformal. Melalui pendidikan formal, ini dapat dilakukan melalui program wajib belajar 9 tahun harus dioptimalkan agar penduduk dapat menamatkan pendidikan hingga lulus SLTA. Sedangkan melalui pendidikan nonformal dapat dilakukan dengan memberikan kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan kerja, pelatihan kewirausahaan untuk membuka lapangan kerja baru, dan lain sebagainya.

3. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu meningkatkan tingkat kesehatan agar Angka harapan hidup penduduk terus meningkat. Hal ini akan menunjang aktivitas produksi sehingga pendapatan yang diperoleh lebih maksimal dan kemiskinan akan berkurang. Kebijakan dibidang kesehatan dapat dilakukan dengan memperluas jaminan kesehatan seperti BPJS khususnya bagi penduduk yang bermukim di wilayah pedalaman sehingga peningkatan kesehatan dapat dilakukan secara merata.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar peneliti berikutnya dapat menambah variabel yang disesuaikan dengan kondisi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta menambah periode yang lebih panjang sehingga dapat memperoleh hasil yang representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariefianto, M.F. (2012). *Ekonometrika Esensi Dan Aplikasi Dengan Menggunakan Eviews*. Jakarta : Erlangga.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, L. (2016). *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kelima. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Astuti, R. R. (2015). *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2004 – 2012*. Yogyakarta : FE UNY.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Analisis Makro Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2007). *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2007*. Provinsi D.I. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2008). *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2008*. Provinsi D.I. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2009). *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2009*. Provinsi D.I. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2010). *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2010*. Provinsi D.I. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2011*. Provinsi D.I. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2012*. Provinsi D.I. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2013*. Provinsi D.I. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2014*. Provinsi D.I. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2015*. Provinsi D.I. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2016*. Provinsi D.I. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta.

- Badan Pusat Statistik. (2014). *Berita Resmi Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. No 66/11/34/Th.XVI, 5 November 2014. Provinsi D.I. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014*. Provinsi D.I. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016*. Provinsi D.I. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Statistik Ketenagakerjaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2013-2014*. Provinsi D.I. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DIY, *Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DIY tahun 2016*. Yogyakarta.
- Ghozali, I. & Dwi R. (2013). *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika : Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 8*. Semarang :Universitas Diponegoro Semarang.
- Gujarati, N. D. & Dawn, C.P. (2013). *Dasar-dasar Ekonometrika Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hadi, S. (2004). *Analisis Regresi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hakimudin, D. R. (2010). *Analisis Efisiensi Belanja Kesehatan Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2007*. Semarang: FE Universitas Diponegoro.
- Faturrohmin, R. (2011). *Pengaruh PDRB, Harapan Hidup, Dan Melek Huruf Terhadap Tingkat Kemiskinan Di 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.
- Jhingan, M.L. (2000). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Penerjemah: D. Guritno. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
- Kuncoro, M. (2010). *Masalah, Kebijakan, dan Politik: Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kuncoro, M. (2003). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Nasir, M. M. Saichudin & Maulizar. (2008). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kabupaten Purworejo*. Jurnal Eksekutif. Vol. 5 No. 4, Agustus 2008. Lipi: Jakarta.

- Niswati, K. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2011*. Ekonomi regional Vol. 9, No.2, September 2014. Universitas Jenderal Soedirman.
- Simatupang, P. & Saktyanu K. D. (2003). *Produksi Domestik Bruto, Harga, dan Kemiskinan, Media Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. Hal. 191 - 324, Vol. 51, No 3.
- Permana, A.Y. (2012). *Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2004-2009*. Semarang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Prasetyo, A. A. (2010). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2003-2007)*. Semarang: FE Universitas Diponegoro.
- Rencana Kerja Pembangunan Daerah , Daerah Istimewa Yogyakarta. 2016. Yogyakarta.
- Renggapratiwi, A. (2009). *Kemiskinan Dalam Perkembangan Kota Semarang: Karakteristik Dan Respon Kebijakan*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Shalimow. (2004). *Pemberdayaan Sektor Informal Masyarakat Melalui P2KP* diakses melalui <http://www.shalimow.com/aneka-bisnis/pemberdayaan-sektor-informal-masyarakat-melalui-p2kp-sekedar-abstraksi.html> pada tanggal 8 Februari 2017.
- Siregar, H. & Dwi W. (2008). *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. Dikutip dari http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/PROS_2008_MAK3.pdf. Diakses tanggal 11 Januari 2017.
- Sitepu, R. K. & Bonar M. S. (2004). *Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia*. Dikutip dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=86291&val=245> Diakses tanggal 11 Januari 2017.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan : Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Suryawati, C. (2005). *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. JMPK.Vol08/No03/September/2005.
- Todaro, M. P. & Stephen C. S. (2003). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi Kedelapan, Erlangga, Jakarta.

- Todaro, M. P. & Stephen C. S. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Jilid 1. Edisi 11. Alih Bahasa. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Tambunan, T. (2014). *Perekonomian Indonesia: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dinkes. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*.
- Depdikbud. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Wongdesmiwati. (2009). *Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Ekonometrika*.
[http://wongdesmiwati.files.wordpress.com/2009/10/pertumbuhan-ekonomi-danpengentasan-kemiskinan-di-indonesia-analisis-ekonometri .pdf](http://wongdesmiwati.files.wordpress.com/2009/10/pertumbuhan-ekonomi-danpengentasan-kemiskinan-di-indonesia-analisis-ekonometri.pdf).
Diakses tanggal 11 Januari 2017.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. DATA PENELITIAN

Kabupaten/kota	Tahun	Y	X1	X2	X3
Kabupaten Kulonprogo	2004	25.11	1398744	7.4	72.6
Kabupaten Kulonprogo	2005	26.8	1465477	7.7	73.07
Kabupaten Kulonprogo	2006	28.39	1524848	7.8	73.2
Kabupaten Kulonprogo	2007	28.61	1587630	7.8	73.47
Kabupaten Kulonprogo	2008	26.85	1662370	7.8	73.79
Kabupaten Kulonprogo	2009	24.65	1728304	7.89	74.09
Kabupaten Kulonprogo	2010	23.15	1781227	8.2	74.38
Kabupaten Kulonprogo	2011	23.62	5246147	8.37	74.48
Kabupaten Kulonprogo	2012	23.31	5475148	8.37	74.58
Kabupaten Kulonprogo	2013	21.39	5741660	8.37	75.03
Kabupaten Kulonprogo	2014	20.64	6002787	8.2	74.9
Kabupaten Bantul	2004	18.55	3080312	7.91	70.8
Kabupaten Bantul	2005	18.21	3234173	8	70.87
Kabupaten Bantul	2006	20.25	3299646	8	70.9
Kabupaten Bantul	2007	19.43	3448948	8.36	70.95
Kabupaten Bantul	2008	18.54	3618060	8.55	71.11
Kabupaten Bantul	2009	17.64	3779948	8.64	71.21
Kabupaten Bantul	2010	16.09	3967928	8.82	71.31
Kabupaten Bantul	2011	17.28	12728666	8.92	71.33
Kabupaten Bantul	2012	16.97	13407022	8.95	71.34
Kabupaten Bantul	2013	16.48	14138719	9.02	71.62
Kabupaten Bantul	2014	15.89	14867409	8.74	73.24
Kabupaten Gunungkidul	2004	25.19	2613238	7.4	70.4
Kabupaten Gunungkidul	2005	27.29	2726389	7.6	70.44
Kabupaten Gunungkidul	2006	28.45	2830583	7.6	70.6
Kabupaten Gunungkidul	2007	28.9	2941288	7.6	70.75
Kabupaten Gunungkidul	2008	25.96	3070298	7.6	70.79
Kabupaten Gunungkidul	2009	24.44	3197365	7.61	70.88
Kabupaten Gunungkidul	2010	22.05	3330080	7.65	70.97
Kabupaten Gunungkidul	2011	23.03	9248011	7.7	71.01
Kabupaten Gunungkidul	2012	22.71	9695980	7.7	71.04
Kabupaten Gunungkidul	2013	21.7	10177433	7.79	71.36
Kabupaten Gunungkidul	2014	20.83	10639466	6.45	73.39
Kabupaten Sleman	2004	15.53	4839376	9.79	72.7
Kabupaten Sleman	2005	14.06	5080563	10.07	72.7
Kabupaten Sleman	2006	12.7	5309059	10.1	73.8

Kabupaten/kota	Tahun	Y	X1	X2	X3
Kabupaten Sleman	2007	12.56	5553580	10.1	74.1
Kabupaten Sleman	2008	12.34	5838246	10.1	74.43
Kabupaten Sleman	2009	11.45	6099557	10.18	74.74
Kabupaten Sleman	2010	10.7	6373200	10.3	75.06
Kabupaten Sleman	2011	10.61	22645852	10.51	75.18
Kabupaten Sleman	2012	10.44	23957113	10.52	75.29
Kabupaten Sleman	2013	9.68	25367414	10.55	75.79
Kabupaten Sleman	2014	9.5	26740537	10.28	74.47
Kota Yogyakarta	2004	12.77	4195392	10.69	72.9
Kota Yogyakarta	2005	10.5	4399902	10.82	72.9
Kota Yogyakarta	2006	10.22	4574051	10.8	73.1
Kota Yogyakarta	2007	9.78	4776401	10.95	73.14
Kota Yogyakarta	2008	10.81	5021149	11.42	73.27
Kota Yogyakarta	2009	10.05	5244851	11.48	73.35
Kota Yogyakarta	2010	9.75	5505942	11.48	73.44
Kota Yogyakarta	2011	9.62	18206090	11.52	73.48
Kota Yogyakarta	2012	9.38	19187075	11.56	73.51
Kota Yogyakarta	2013	8.82	20239557	11.56	73.71
Kota Yogyakarta	2014	8.67	21312143	11.39	74.05

LAMPIRAN 2. STATISTIK DESKRIPTIF

Date: 10/11/17
Time: 19:01
Sample: 2004 2014

	Y	X1	X2	X3
Mean	2.806364	15.52127	9.103273	72.81836
Median	2.870000	15.44000	8.640000	73.14000
Maximum	3.360000	17.10000	11.56000	75.79000
Minimum	2.160000	14.15000	6.450000	70.40000
Std. Dev.	0.392038	0.812971	1.458546	1.563329
Skewness	-0.196794	0.332853	0.345509	-0.040844
Kurtosis	1.578494	2.293846	1.720906	1.711573
Jarque-Bera	4.985730	2.158334	4.843642	3.819561
Probability	0.082673	0.339879	0.088760	0.148113
Sum	154.3500	853.6700	500.6800	4005.010
Sum Sq. Dev.	8.299473	35.68981	114.8772	131.9760
Observations	55	55	55	55

LAMPIRAN 3. REGRESI *COMMON EFFECT MODEL*

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 10/11/17 Time: 18:54
Sample: 2004 2014
Periods included: 11
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0.100697	0.021439	-4.696851	0.0000
X2	-0.225405	0.013046	-17.27790	0.0000
X3	0.001946	0.010848	0.179397	0.8583
C	6.279520	0.769419	8.161382	0.0000
R-squared	0.929411	Mean dependent var		2.806364
Adjusted R-squared	0.925258	S.D. dependent var		0.392038
S.E. of regression	0.107179	Akaike info criterion		-1.558684
Sum squared resid	0.585856	Schwarz criterion		-1.412696
Log likelihood	46.86380	Hannan-Quinn criter.		-1.502229
F-statistic	223.8291	Durbin-Watson stat		1.217766
Prob(F-statistic)	0.000000			

LAMPIRAN 4. REGRESI *FIXED EFFECT MODEL*

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 10/11/17 Time: 18:55
 Sample: 2004 2014
 Periods included: 11
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0.061616	0.021379	-2.882033	0.0059
X2	-0.033427	0.032600	-1.025346	0.3104
X3	-0.071334	0.016941	-4.210803	0.0001
C	9.261428	1.077190	8.597767	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.976044	Mean dependent var	2.806364
Adjusted R-squared	0.972476	S.D. dependent var	0.392038
S.E. of regression	0.065041	Akaike info criterion	-2.493874
Sum squared resid	0.198826	Schwarz criterion	-2.201898
Log likelihood	76.58154	Hannan-Quinn criter.	-2.380965
F-statistic	273.5566	Durbin-Watson stat	1.783211
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN 5. REGRESI *RANDOM EFFECT MODEL*

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 10/11/17 Time: 18:55
Sample: 2004 2014
Periods included: 11
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 55
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0.061290	0.016284	-3.763860	0.0004
X2	-0.181049	0.015688	-11.54056	0.0000
X3	-0.038747	0.012006	-3.227464	0.0022
C	8.227314	0.755167	10.89469	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.045803	0.3315
Idiosyncratic random		0.065041	0.6685

Weighted Statistics			
R-squared	0.778171	Mean dependent var	1.104571
Adjusted R-squared	0.765123	S.D. dependent var	0.184413
S.E. of regression	0.089374	Sum squared resid	0.407373
F-statistic	59.63574	Durbin-Watson stat	1.163298
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.890454	Mean dependent var	2.806364
Sum squared resid	0.909172	Durbin-Watson stat	0.587639

LAMPIRAN 6. UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	22.872310	(4,47)	0.0000
Cross-section Chi-square	59.435477	4	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 10/11/17 Time: 18:55

Sample: 2004 2014

Periods included: 11

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0.100697	0.021439	-4.696851	0.0000
X2	-0.225405	0.013046	-17.27790	0.0000
X3	0.001946	0.010848	0.179397	0.8583
C	6.279520	0.769419	8.161382	0.0000
R-squared	0.929411	Mean dependent var		2.806364
Adjusted R-squared	0.925258	S.D. dependent var		0.392038
S.E. of regression	0.107179	Akaike info criterion		-1.558684
Sum squared resid	0.585856	Schwarz criterion		-1.412696
Log likelihood	46.86380	Hannan-Quinn criter.		-1.502229
F-statistic	223.8291	Durbin-Watson stat		1.217766
Prob(F-statistic)	0.000000			

LAMPIRAN 7. UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	48.298190	3	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	-0.061616	-0.061290	0.000192	0.9812
X2	-0.033427	-0.181049	0.000817	0.0000
X3	-0.071334	-0.038747	0.000143	0.0064

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 10/11/17 Time: 18:56

Sample: 2004 2014

Periods included: 11

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 55

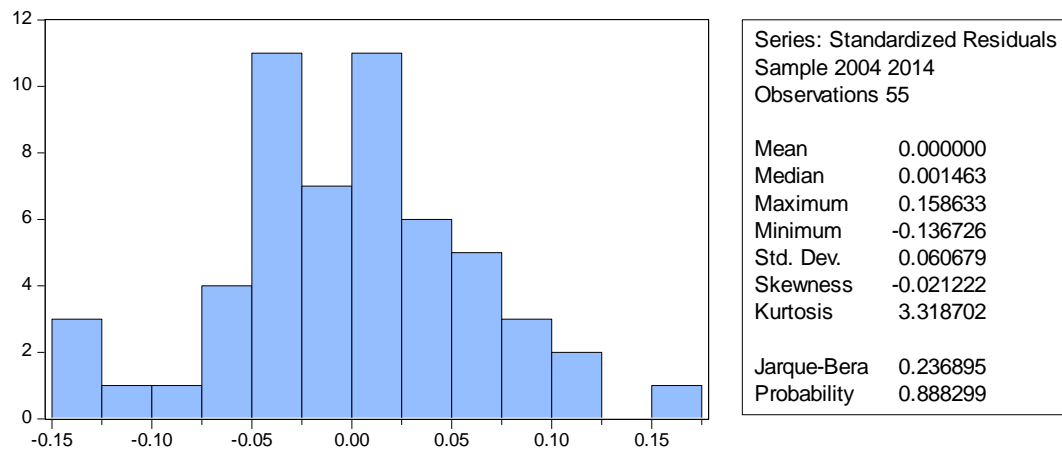
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.261428	1.077190	8.597767	0.0000
X1	-0.061616	0.021379	-2.882033	0.0059
X2	-0.033427	0.032600	-1.025346	0.3104
X3	-0.071334	0.016941	-4.210803	0.0001

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.976044	Mean dependent var	2.806364
Adjusted R-squared	0.972476	S.D. dependent var	0.392038
S.E. of regression	0.065041	Akaike info criterion	-2.493874
Sum squared resid	0.198826	Schwarz criterion	-2.201898
Log likelihood	76.58154	Hannan-Quinn criter.	-2.380965
F-statistic	273.5566	Durbin-Watson stat	1.783211
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN 8. UJI NORMALITAS



LAMPIRAN 9. UJI MULTIKOLINEARITAS

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.542951	0.334902
X2	0.542951	1.000000	0.505041
X3	0.334902	0.505041	1.000000

LAMPIRAN 10. UJI HETEROKESDASITAS

Dependent Variable: LOG(RESID2)
Method: Panel Least Squares
Date: 10/11/17 Time: 18:58
Sample: 2004 2014
Periods included: 11
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26.59953	31.11048	0.855002	0.3969
X1	0.159595	0.617456	0.258472	0.7972
X2	-1.237334	0.941534	-1.314168	0.1952
X3	-0.337533	0.489267	-0.689875	0.4937

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.095222	Mean dependent var	-6.765740
Adjusted R-squared	-0.039533	S.D. dependent var	1.842394
S.E. of regression	1.878459	Akaike info criterion	4.232504
Sum squared resid	165.8445	Schwarz criterion	4.524479
Log likelihood	-108.3939	Hannan-Quinn criter.	4.345413
F-statistic	0.706631	Durbin-Watson stat	2.037031
Prob(F-statistic)	0.666389		

LAMPIRAN 11. UJI AUTOKORELASI

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 10/11/17 Time: 18:55
 Sample: 2004 2014
 Periods included: 11
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0.061616	0.021379	-2.882033	0.0059
X2	-0.033427	0.032600	-1.025346	0.3104
X3	-0.071334	0.016941	-4.210803	0.0001
C	9.261428	1.077190	8.597767	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.976044	Mean dependent var	2.806364
Adjusted R-squared	0.972476	S.D. dependent var	0.392038
S.E. of regression	0.065041	Akaike info criterion	-2.493874
Sum squared resid	0.198826	Schwarz criterion	-2.201898
Log likelihood	76.58154	Hannan-Quinn criter.	-2.380965
F-statistic	273.5566	Durbin-Watson stat	1.783211
Prob(F-statistic)	0.000000		